



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
[BPSDM] PROVINSI RIAU**

RENSTRA 2025-2029

*"Riau Rumah Rumpun
Melayu, Merawat Tuah,
Menjaga Marwah, Takkan
Melayu Hilang Di Bumi"*



RENCANA STRATEGIS BPSDM PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029

BPSDM PROVINSI RIAU

Jl. Ronggowarsito, No. 14

Telp. (0761) 28997

Email : bpsdm@riau.go.id

Website : <https://bpsdm.riau.go.id>



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh .



Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah tahun 2019-2024, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau sebagai perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periodik perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program kegiatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Pada Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

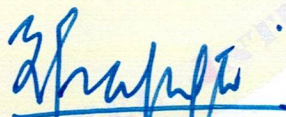
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BPSDM Provinsi Riau sebagai perangkat daerah yang menjalankan Fungsi Urusan Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur menjadi salah satu perangkat daerah yang berkontribusi dalam pencapaian visi **“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologi, Agamis, dan Maju”** melalui perwujudan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkompetensi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Renstra BPSDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih beriring harapan semoga apa yang telah kita kerjakan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta diberkati dan diridhoi oleh Allah SWT.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Oktober 2025
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU,**



EVAREFITA SE, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19720628 199703 2 004

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan BPSDM Provinsi Riau	12
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.3 Sumber Daya BPSDM Provinsi Riau	18
2.4 Kinerja BPSDM Provinsi Riau	37
2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan BPSDM Provinsi Riau	60
2.6 Mitra Kerja BPSDM dan Kerjasama BPSDM Dalam Pengembangan Kompetensi ASN	60
2.7 Identifikasi Permasalahan	62
2.8 Isu Strategis BPSDM Provinsi Riau	67
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	71
3.2. Strategi BPSDM Provinsi Riau	73
3.3. Pentahapan	76
3.4. Lokus	76
3.5. Kebijakan	76
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	78
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Hasil Cascading dari Tujuan dan sasaran	78
BAB V PENUTUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1	Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.3.2	Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/Eselon ...	20
Tabel 2.3.3	Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Kepangkatan.....	21
Tabel 2.4.1	Capaian Kinerja Kelembagaan dan Program Pelatihan BPSDM Provinsi Riau Tahun 2023 s/d 2024	38
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM	40
Tabel 2.4.2	Capaian Pelayanan Pelatihan BPSDM Berdasarkan Formulasi IKU	42
Tabel 2.4.3	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pelatihan 2020-2024	43
Tabel 2.4.4	Capaian Pelayanan Pelatihan PNS yang Dilaksanakan di BPSDM Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024	44
Tabel 2.4.5	Data Pemenuhan Hak dan Kesempatan PNS Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi.....	45
Tabel 2.4.6	Alumni Diklat BPSDM Provinsi Riau	46
Tabel 2.4.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan Perangkat Daerah.....	47
Tabel 2.4.8	Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Riau yang Telah Lulus Pelatihan Struktural.....	48
Tabel 2.4.9	ASN Pemerintah Provinsi Riau yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tahun 2023	50
Tabel 2.4.10	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Sosiokultural yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Riau	53
Tabel 2.6.1	Jumlah Kerjasama BPSDM dengan Kementerian, Lembaga, Kabupaten, Kota dan Lembaga Pelatihan Tahun 2023-2024	61
Tabel 2.7.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	66
Tabel 2.8.1	Analisa Isu Strategis	70
Tabel 3.1.1	Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi Riau	72
Tabel 3.2.1	Tujuan, Sasran, dan Strategi BPSDM Provinsi Riau	75
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra BPSDM Provinsi Riau	75
Tabel 3.5	Arah dan Kebijakan BPSDM Provinsi Riau.....	76
Tabel 4.1	Program BPSDM Provinsi Riau	81

Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Final Renstra BPSDM Provinsi Riau	82
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan BPSDM Provinsi Riau	95
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Final Renstra BPSDM Provinsi Riau.....	114
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Final Renstra BPSDM Provinsi Riau	115
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Final Renstra BPSDM Provinsi Riau	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Riau	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan	3
Gambar 2.1 Bagan Organisasi BPSDM Provinsi Riau	17
Gambar 2.2 Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Gambar 2.3 Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/Eselon....	21
Gambar 2.4 Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Kepangkatan.....	22
Gambar Sarana dan Prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	28
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPSDM Provinsi Riau	79
Gambar 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPSDM Provinsi Riau	78



BAB I

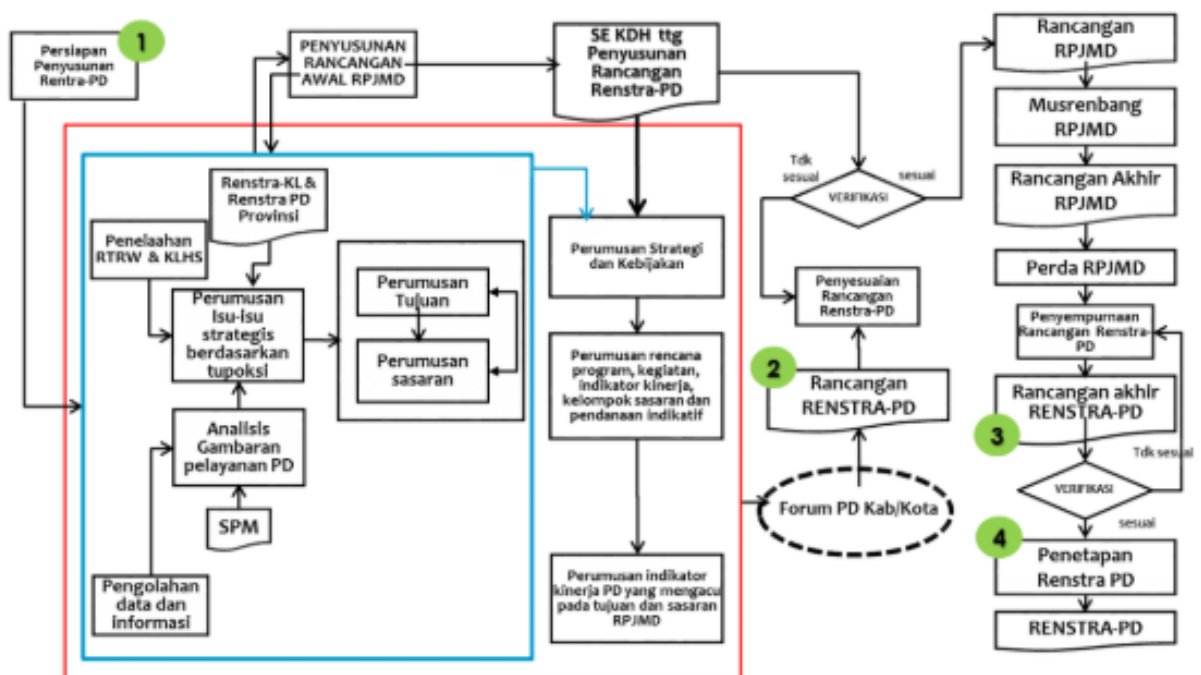
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional. Dokumen Rencana Strategis BPSDM Provinsi Riau yang disusun berfungsi sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Proses penyusunan Rencana Strategis BPSDM Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

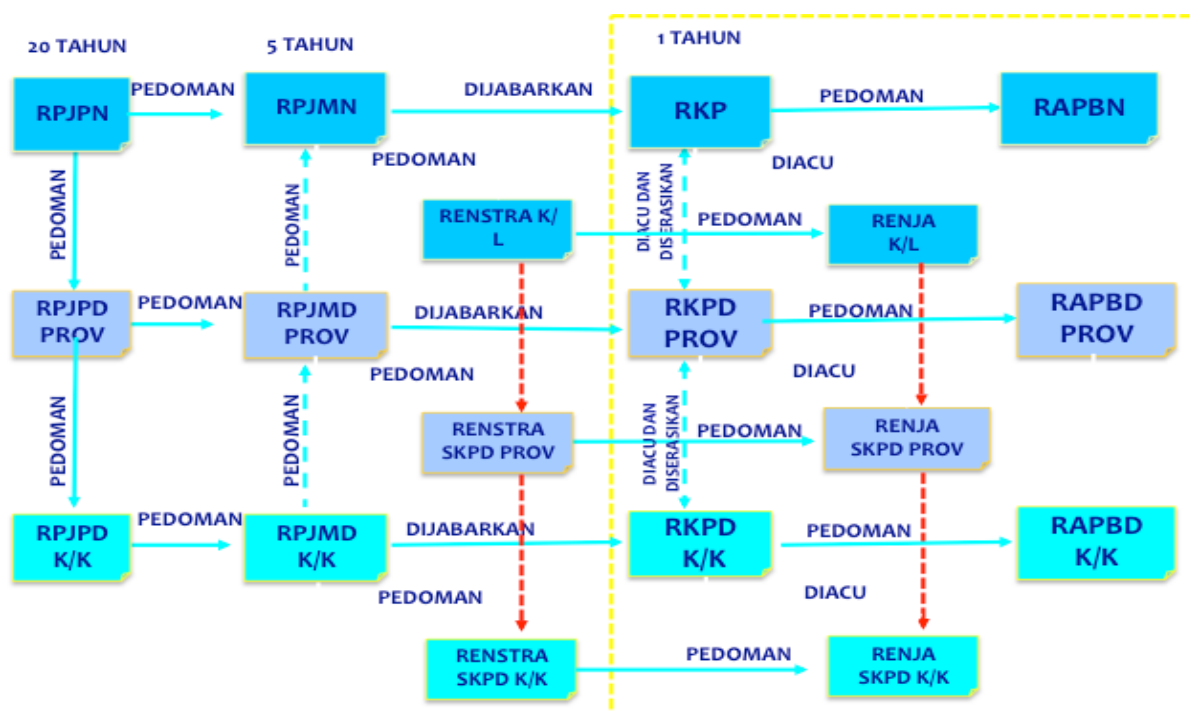
Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Keterkaitan Renstra BPSDM Provinsi Riau dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan, bahwa posisinya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja perangkat daerah. Penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, dan Renstra Perangkat Daerah terkait di kabupaten/kota. Keterkaitan dokumen Renstra perangkat daerah dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada bagan alur berikut:

Gambar 1.2.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Berdasarkan Surat Gubernur Riau, 000.7.2/BAPPEDA/2025/4626 Tanggal 30 September 2025 tentang Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) PD dan Penyampaian Reviu Renstra PD Tahun 2025-2029 ke Inspektorat Provinsi Riau, Perangkat Daerah harus mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara telah melaksanakan fungsi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi pada setiap kegiatan berbasis Gender, sehingga ketimpangan dan isu gender tidak menjadi persoalan dalam melaksanakan fungsi urusan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau .

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 memperhatikan peraturan perundangan yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor:7);

25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Riau Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor:5);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Riau tahun 2025-2029 yaitu Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Penjabaran pada Misi Ke V RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Berintegritas serta pelayanan Publik yang berkualitas dengan dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju Pemerintahan yang berkelas dunia (World Class Goverment)”*. Guna Mendukung Pencapaian Pembangunan tersebut telah disajikan Dokumen Perencanaan Periodik BPSDM Provinsi Riau yang merupakan salah satu wujud implementasi sistem perencanaan pembangunan

di daerah dengan berbagai pendekatan isu tematik Dimana salah satunya Responsif Gender dan Inklusif. Sistem perencanaan yang responsif gender bertujuan agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tidak bias terhadap salah satu jenis kelamin, tetapi justru mampu menjawab kebutuhan spesifik baik laki-laki maupun perempuan secara proporsional. Sementara itu, sifat inklusif dalam perencanaan menekankan pentingnya pelibatan kelompok-kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, lansia, anak-anak, dan kelompok minoritas, sehingga mereka memiliki ruang partisipasi yang setara dalam proses pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara menyeluruh tanpa diskriminasi.

Tujuan Penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah;
- 2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;
- 4) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

- 5) Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.
- 6) Mewujudkan komitmen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau dalam menyelenggarakan fungsi urusan Perangkat Daerah berbasis kesetaraan Gender.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis BPSDM Provinsi Riau mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPSDM PROVINSI RIAU

- 2.1. Gambaran Pelayanan BPSDM Provinsi Riau
- 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3. Sumber Daya BPSDM Provinsi Riau
- 2.4. Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau
- 2.5. Kelompok Sasaran Pelayanan BPSDM Provinsi Riau
- 2.6. Mitra Kerja BPSDM dan Kerjasama BPSDM dalam Pengembangan Kompetensi ASN
- 2.7. Identifikasi Permasalahan
- 2.8. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2. Strategi Perangkat Daerah

- 3.3. Pentahapan
- 3.4. Lokus
- 3.5 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Hasil Cascading Dari Tujuan Dan Sasaran

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan ringkas terkait Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan berbagai harapan terhadap pelaksanaannya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPSDM PROVINSI RIAU

2.1. Gambaran Pelayanan BPSDM Provinsi Riau

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan sebuah Proses yang dilakukan Secara Sistematis untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Individu dalam organisasi sehingga dapat bekerja lebih efektif dan produktif. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu Dimensi Individu mengacu pada sesuatu yang dicapai pegawai, serta Dimensi Institusional mengacu pada sesuatu yang dicapai organisasi sebagai manfaat dari program pengembangan sumber daya manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 49, menyatakan bahwa Setiap Aparatur Sipil Negara **Wajib** melakukan Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan perkembangan organisasi. Upaya untuk pemenuhan Pengembangan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa pengembangan sumber daya manusia aparatur terkait erat dengan peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.

BPSDM Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Penunjang ini yang dilaksanakan BPSDM Provinsi Riau Sesuai dengan Undang – Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No 90 Terkait Kodefikasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjalankan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur.

BPSDM Provinsi Riau juga merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan aparatur di daerah bersama perangkat daerah lain. Paling tidak terdapat 4 (empat) komponen perangkat daerah/unit kerja yang terkait langsung dengan kebijakan pembangunan aparatur, yaitu BKD Provinsi Riau (terkait manajemen ASN), BPSDM Provinsi Riau (terkait pengembangan kompetensi ASN), Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau (terkait standar jabatan ASN), dan Inspektorat Daerah Provinsi Riau (terkait pengawasan ASN).

Terkait data dan informasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau menyediakan layanan pendataan SDM yang berfokus pada penyajian informasi mengenai ASN Disabilitas yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Melalui mekanisme pengelolaan data yang terstruktur, informasi terkait jumlah peserta, jenis diklat, serta perkembangan kompetensi dihimpun secara akurat dan mutakhir. Layanan ini mendukung perencanaan pengembangan SDM yang inklusif serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan kompetensi ASN Disabilitas secara berkelanjutan. Namun hingga tahun 2025, belum ada peserta Disabilitas yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

Selain itu, sarana dan prasarana pendukung Inklusi dan Gender di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau telah disediakan, seperti Toilet dan ruang lactasi

2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPSDM Provinsi Riau

BPSDM Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, yang mana dinyatakan bahwa BPSDM merupakan Badan Daerah Provinsi tipe A melaksanakan fungsi urusan penunjang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Lebih lanjut tentang BPSDM Provinsi Riau dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dijelaskan Bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas sebagai membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan Aparatur yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural, serta Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural, serta Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural, serta Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional;
- d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural, serta Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023, Unit kerja BPSDM Provinsi Riau terdiri dari:

I. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum. Terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu:

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, serta Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi.

III. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas, serta Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader.

IV. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan, Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar, serta Pengembangan Integritas dan Sosiokultural.

V. Bidang Pengembangan Teknis Umum dan Fungsional

Bidang Pengembangan Teknis Umum dan Fungsional menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

Selain tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja tersebut di atas, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur, BPSDM Provinsi Riau dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki Beberapa kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diantaranya Widyaiswara, Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur & Analis SDM Aparatur yang merupakan jabatan fungsional spesifik yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur.

Dengan telah dibentuknya BPSDM Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016, susunan organisasi selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, dimana organisasi BPSDM Provinsi Riau terdiri dari :

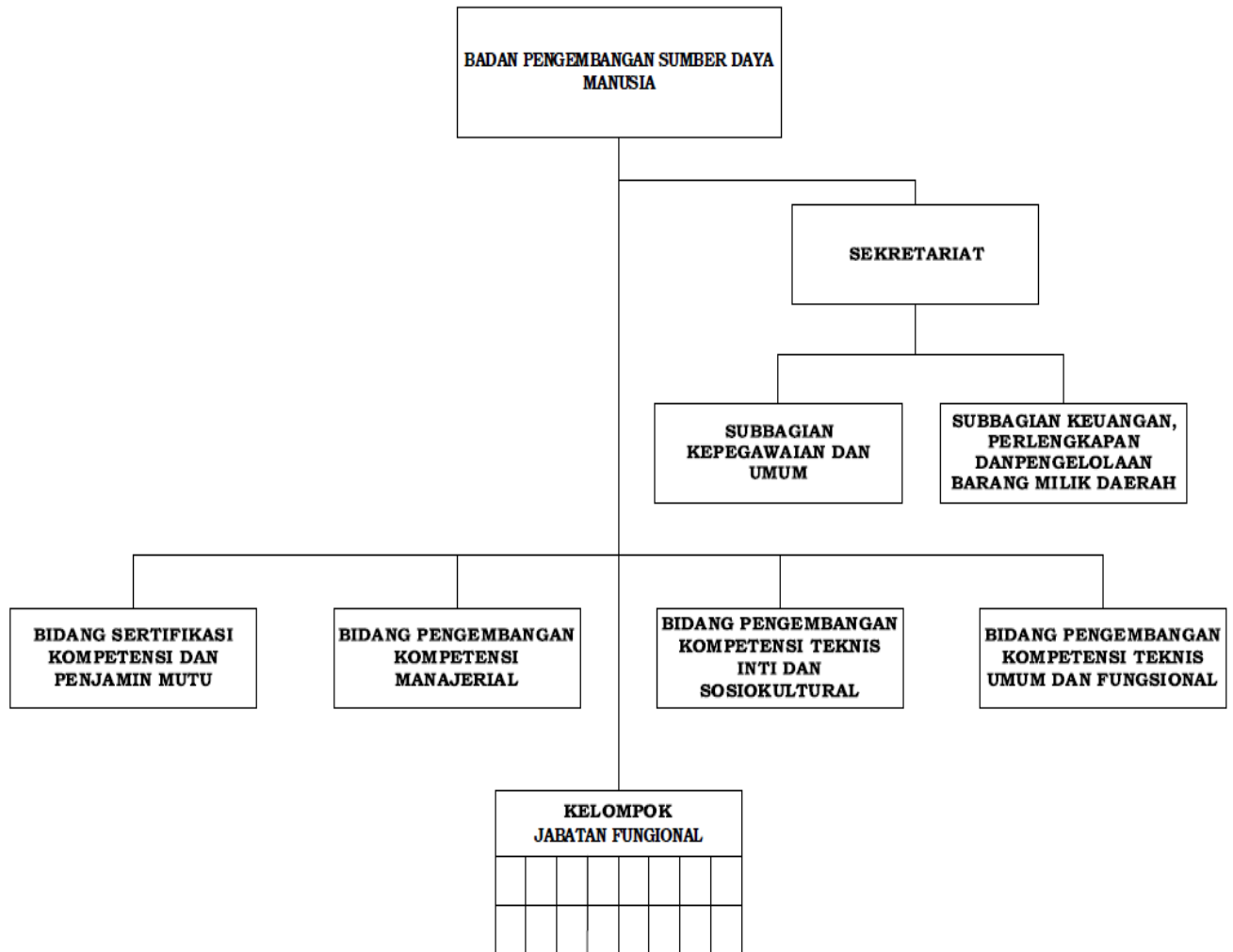
- a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3) Kelompok jabatan Fungsional
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional .
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi BPSDM Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar bagan organisasi berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Organisasi BPSDM Provinsi Riau

DD. BAGAN STRUKTUR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU



2.3. Sumber Daya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

A. Sumber Daya Aparatur

Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Manusia Provinsi Riau, terdapat 8 (delapan) jabatan struktural/eselon yaitu :

- a. Eselon II.a : 1 (satu) Jabatan
- b. Eselon III.a : 5 (lima) Jabatan
- c. Eselon IV.a : 2 (dua) Jabatan

Untuk jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPSDM Provinsi Riau berdasarkan Daftar Perkembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPSDM Provinsi Riau Semester II Tahun 2025 adalah sebanyak 122 (Seratus Dua Puluh Dua) yang terdiri dari 102 Orang PNS dan 20 Orang PPPK.

Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan juga sebagai tenaga kediklatan, secara garis besar dikelompokan sebagai :

- a. Pengelola Pelatihan (Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas & Ketua Tim Kerja);
- b. Tenaga Pengajar (Widyaisawara); dan
- c. Penyelenggara Pelatihan (Pelaksana & fungsional tertentu).

Adapun rincian ASN BPSDM Provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.3.1

Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

PNS				
NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	DIFABEL	%
1.	Laki-Laki	60	-	49,18
2.	Perempuan	42	-	34,43
JUMLAH		102	-	
PPPK PENUH WAKTU				
1.	Laki-Laki	10	-	8,20
2.	Perempuan	8	-	6,56
JUMLAH		18		14,75
PPPK PARUH WAKTU				
1	Laki-Laki	1	-	0,82
2	Perempuan	1	-	0,82
JUMLAH		2	-	1,64
TOTAL		122	-	100,00

Sumber Data : Daftar Perkembangan Pegawai BPSDM Provinsi Riau Semester II Tahun 2025

Data pada Tabel 2.3.1 menggambarkan bahwa ASN BPSDM Provinsi Riau didominasi jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 71 orang atau 58,20%. Dari sisi gender komposisi ini masih berpeluang untuk diseimbangkan.

Secara sederhana gambaran komposisi ASN BPSDM Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 2.2
Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.3.2
Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan/Eselon

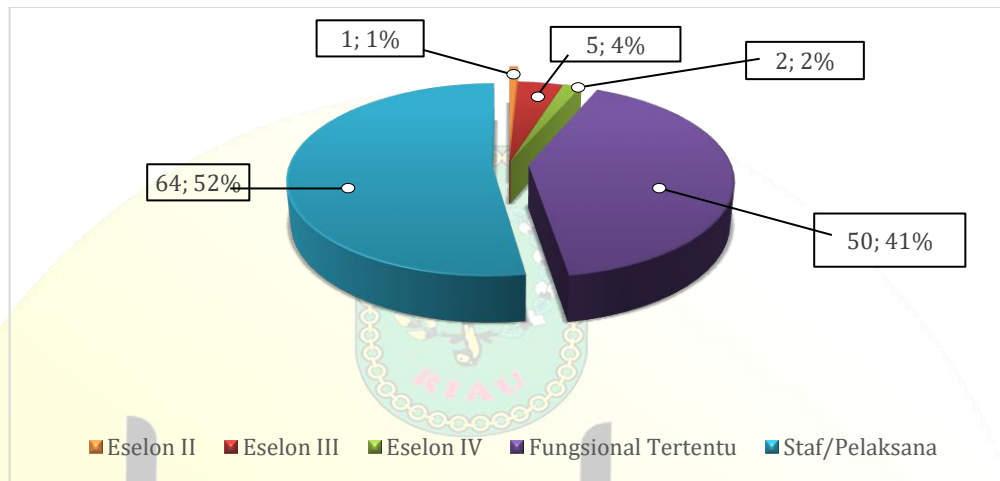
PNS					
NO.	JABATAN/ESELON	JUMLAH (Orang)	%	JENIS KELAMIN	
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Pj. Tinggi Pratama / Eselon II	1	0,82		1
2.	Pj. Administrator / Eselon III	5	4,10	3	2
3.	Pj. Pengawas / Eselon IV	2	1,64		2
4.	Fungsional Tertentu Lainnya	39	31,97	29	10
	a. Fungsional Widyaiswara :				
	- Widyaiswara Ahli Utama	7	5,74	6	1
	- Widyaiswara Ahli Madya	13	10,66	12	1
	- Widyaiswara Ahli Muda	2	1,64	1	1
	- Widyaiswara Ahli Pertama	-			
	b. Fungsional Perencana	1	0,82	1	
	c. Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN	9	7,38	5	4
	d. Fungsional Analis SDM Aparatur	3	2,46	2	1
	e. Fungsional Pustakawan	1	0,82		1
	f. Fungsional Pranata Komputer	2	1,64	2	
	g. Fungsional Arsiparis	1	0,82		1
5.	Pelaksana	55	45,08	28	27
JUMLAH PNS		102	83,61	60	42
PPPK PENUH WAKTU					
1	Fungsional Tertentu Lainnya :	11	9,02	7	4
	a. Fungsional Perencana Ahli Pertama	1	0,82	1	
	b. Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	6,56	4	4
	c. Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1	0,82	1	
	d. Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	1	0,82	1	
2	Pelaksana	7	5,74	2	5
JUMLAH PPPK PENUH WAKTU		18	14,75	9	9
PPPK PARUH WAKTU					
1	Pelaksana	2	1,64	1	1
JUMLAH PPPK PARUH WAKTU		2	1,64	1	1
JUMLAH TOTAL		122	100,00	70	52

Sumber Data : Daftar Perkembangan PNS BPSDM Provinsi Riau Semester II Tahun 2025.

Secara sederhana gambaran ASN BPSDM Provinsi Riau Menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 2.3.

Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/Eselon



c. Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Tabel 2.3.3

Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Kepangkatan

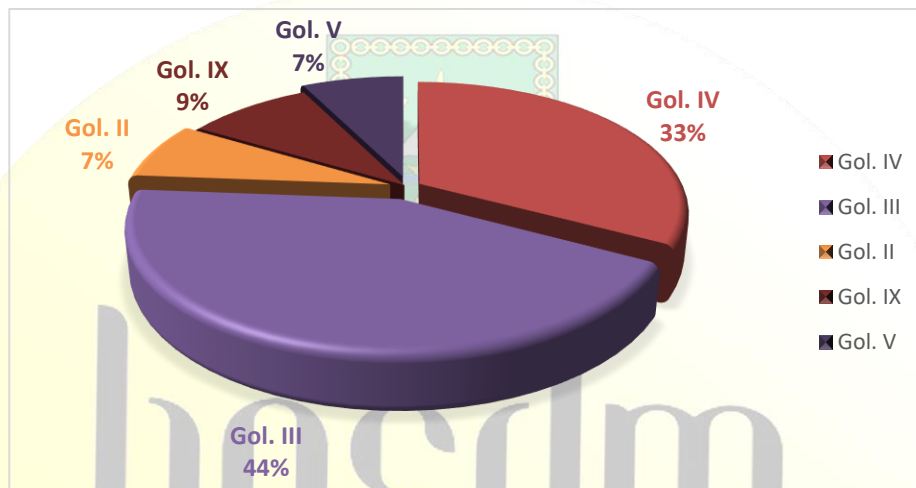
PNS			
NO.	GOLONGAN KEPANGKATAN	JUMLAH (Orang)	%
1.	Gol. IV	40	32,79
2.	Gol. III	53	43,44
3.	Gol. II	9	7,38
4.	Gol. I	-	-
JUMLAH		102	83,61
PPPK PENUH WAKTU			
1.	Gol. IX	11	9,02
2.	Gol. V	7	5,74
JUMLAH		18	14,75
PPPK PARUH WAKTU			
1.	Gol. V	2	1,64
JUMLAH		2	1,64
JUMLAH TOTAL		122	100,00

Sumber Data : Daftar Perkembangan PNS BPSDM Provinsi Riau Semester II Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.3.3 diketahui bahwa ASN pada BPSDM Provinsi Riau didominasi oleh Golongan III, yang berjumlah 53 atau 43,44%, sedangkan golongan

kepangkatan terkecil adalah Golongan II dan Golongan V yang berjumlah 9 orang atau 8,82%. Gambaran kondisi ASN menurut golongan kepangkatan sebagai berikut ini:

Gambar 2.4
Jumlah ASN BPSDM Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan Kepangkatan



B. Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPSDM Provinsi Riau tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia Kediklatan saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan organisasi, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai.

Secara umum sarana dan prasarana digunakan bertujuan yaitu salah satu Upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi

perkantoran, pembinaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM Provinsi Riau.

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPSDM Provinsi Riau saat ini dinilai masih belum memenuhi sesuai standar sebagaimana Hasil Penilaian Akreditasi lembaga Pelatihan yang dilakukan oleh LAN RI yang tertuang dalam surat Kepala LAN RI Nomor 4120/K.1/PDP.09 Tanggal 19 Agustus 2021 yang mana dinyatakan di dalam poin Rekomendasi Perbaikan, yaitu perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan di BPSDM Provinsi. Hal ini dapat dimaklumi karena Usia sarana prasarana yang dimiliki BPSDM Provinsi Riau adalah sarana prasarana eks Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi yang Sudah Berusia 56 Tahun sejak diresmikan penggunaannya pada 1969 Oleh Gubernur Arifin Ahmad. Sementara saat ini BPSDM Provinsi Riau merupakan perangkat daerah eselon II yang memiliki 5 (lima) eselon III, 2 eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Hal ini ditambah lagi masih terdapat aset Bangunan Kantor yang belum dikuasai karena digunakan untuk Kantor UPT Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.

Gambaran sarana yang dimiliki dan dikuasai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan BPSDM Provinsi Riau yaitu perkantoran yang terletak di Jl. Ronggowarsito No. 14 Pekanbaru seluas 27.330 m², terdiri dari :

- a. Ruang Sekretariat (Ruang Kepala Badan, Ruang Subbag Umum, Keuangan, Program)
- b. Ruang Bidang Pengembangan Sosiokultural;
- c. Ruang Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis & Fungsional;
- d. Ruang Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
- e. Ruang Bidang Sertifikasi Kompetensi & Penjamin Mutu;

- f. Ruang Kelas I (Kuantan);
- g. Ruang Kelas II (Bengkalis);
- h. Asrama (A) kapasitas 10 kamar;
- i. Asrama (B) kapasitas 14 kamar;
- j. Asrama (C) kapasitas 15 kamar;
- k. Asrama (D) kapasitas 15 kamar;
- l. Aula Balai Tuah Karya Abdi Negara;
- m. Ruang Rapat Meranti;
- n. Ruang Widyaiswara;
- o. Ruang *Front Office*;
- p. Ruang Selasih;
- q. Ruang Makan Cempaka;
- r. Kantin;
- s. Klinik Kesehatan;
- t. Ruang Bermain Anak dan Laktasi;
- u. Perpustakaan;
- v. Ruang Pelaksanaan diklat Virtual;
- w. Mushollah Al-Aqsa;
- x. Pos Pengamanan & Gerai ATM
- y. Gudang Barang & Gudang Arsip
- z. Sarana Olahraga.

Sarana yang berkaitan langsung dengan proses kediklatan seperti ruang kelas dan asrama telah didukung prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan. Sedangkan sebagian lagi sarana prasarana membutuhkan pemeliharaan dan Upgrading Interior Asrama Guna Peningkatan Kualitas Layanan Pelatihan.

Kondisi Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut di atas dinilai belum mampu meningkatkan kapasitas pelayanan kediklatan dan peningkatan kompetensi bagi **19.591 (PNS 13.254 & P3K 6.337)** yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (*data BKN XII April 2025*) serta **73.067 (PNS 59.624 & P3K 13.443)** yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau (*data BKN XII April 2025*) Sehingga Jika diakumulasikan Jumlah ASN yang berada di Provinsi Riau Sebesar **92.658** ASN, tentunya jumlah ini menjadi Tantangan sekaligus Peluang bagi BPSDM Provinsi Riau Selaku Instansi Pembina Pelatihan dalam menyediakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur.

Sejalan dengan Perkembangan Teknologi Pembelajaran Saat ini Kualitas Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dimiliki BPSDM juga belum mampu secara Optimal untuk merespon Perkembangan pola pembelajaran non klasikal terutama *e-learning* yang sudah diterapkan pada beberapa program diklat teknis serta untuk menunjang pelayanan kediklatan yang sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



Dengan gambaran ruang lingkup tugas, fungsi serta Peran yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Riau, maka perlu upaya peningkatan Kualitas sarana prasarana Pendidikan dan Pelatihan, Baik yang bersifat Fisik Maupun Non Fisik.

Untuk diketahui Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Pekerjaan Penyusunan Masterplan dan DED Kantor BPSDM Provinsi Riau dimana didalamnya telah mengakomodir terhadap Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan.

Pengembangan lahan dan gedung BPSDM Jln. Ronggowarsito diharapkan tetap menjadi tempat kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur, karena

lingkungannya sangat mendukung, yaitu berada pada areal pendidikan di mana terdapat kampus Universitas Riau (UR), Kampus Mandiri (merupakan lembaga pengembangan sumber daya manusia Bank Mandiri yang menerapkan konsep *Corporate University*, beberapa sekolah tingkat menengah (Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan), serta tersedianya akses yang dekat dengan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

Lokasi yang strategis ini sangat menunjang fungsi dan kewenangan BPSDM Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur Provinsi Riau, kabupaten/kota, dan instansi lainnya, yang mana hal ini sejalan dengan status lahan dan bangunan BPSDM Provinsi Riau Jln. Ronggowarsito yang merupakan Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Sekolah).

Di samping itu, perlu menjadi pertimbangan bahwa nilai historis gedung Jln. Ronggowarsito, yaitu merupakan monumen fisik sekaligus menjadi momentum pengembangan aparatur daerah, karena gedung yang diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Arifin Achmad sebagai Gedung Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Provinsi Riau pada tanggal 12 September 1970 telah melahirkan alumni yang banyak menjadi pimpinan di Daerah Provinsi Riau, maupun di luar Provinsi Riau.

Peningkatan sarana dan prasarana BPSDM Provinsi Riau saat ini merupakan prasyarat yang sangat mendesak dalam peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan juga merupakan potensi pendapatan bagi daerah dari retribusi pemanfaatan aset dan retribusi pelayanan kediklatan. Tak kalah pentingnya lagi adalah dapat meningkatkan peran Gubernur untuk mensinergikan

dan membantu Pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan kompetensi aparatur pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau.



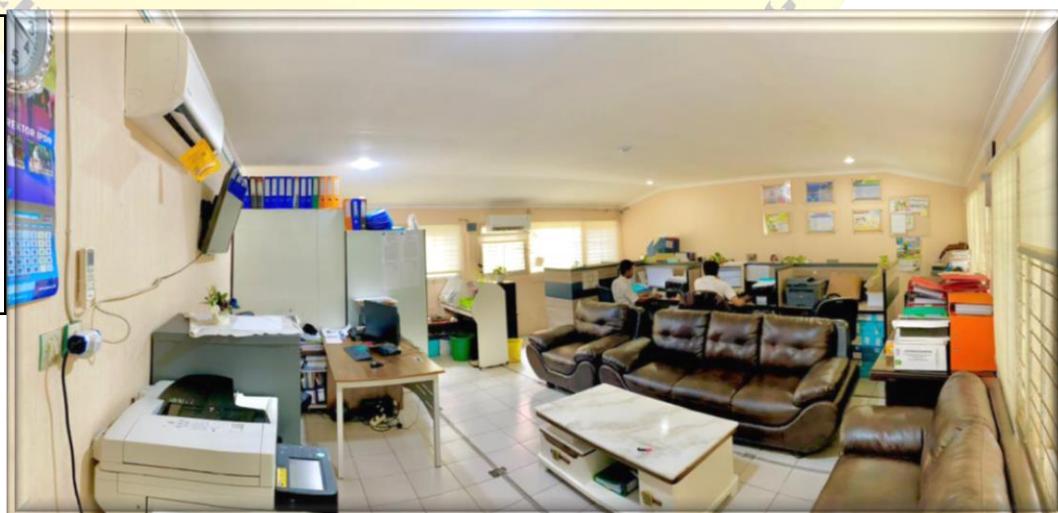
Sarana dan Prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Front Office Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau



Ruang Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Ruang Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau



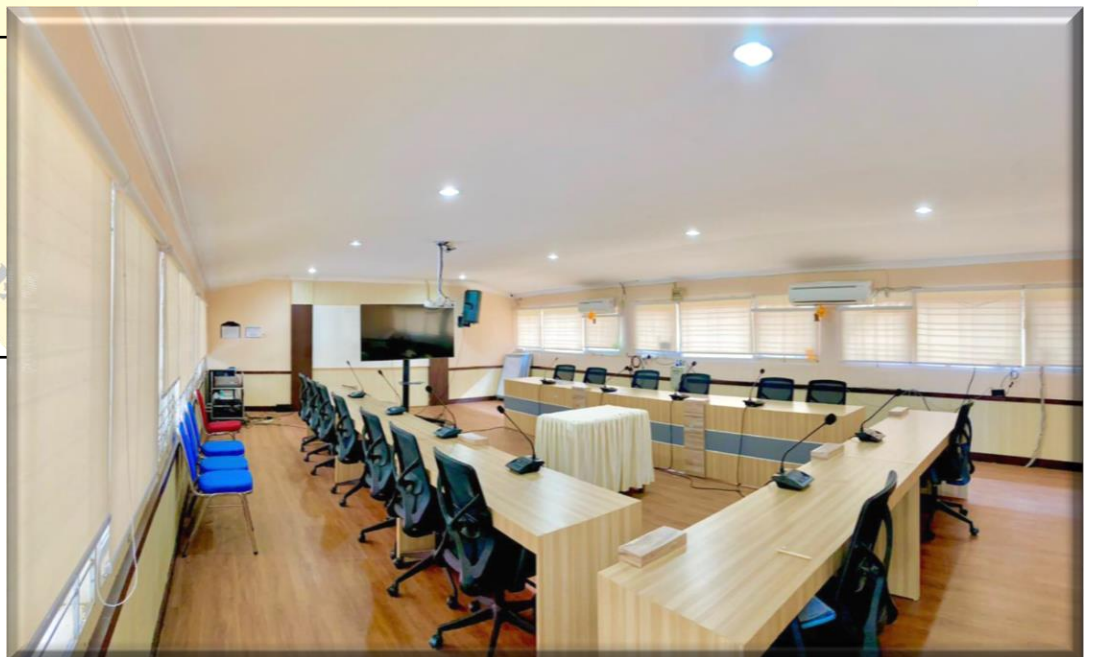


*Ruang Kerja
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



*Aula Balai Tuah
karya Abdi
Negara Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*

*Ruang Rapat
Meranti Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*





*Ruang Pembelajaran Virtual Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Riau*

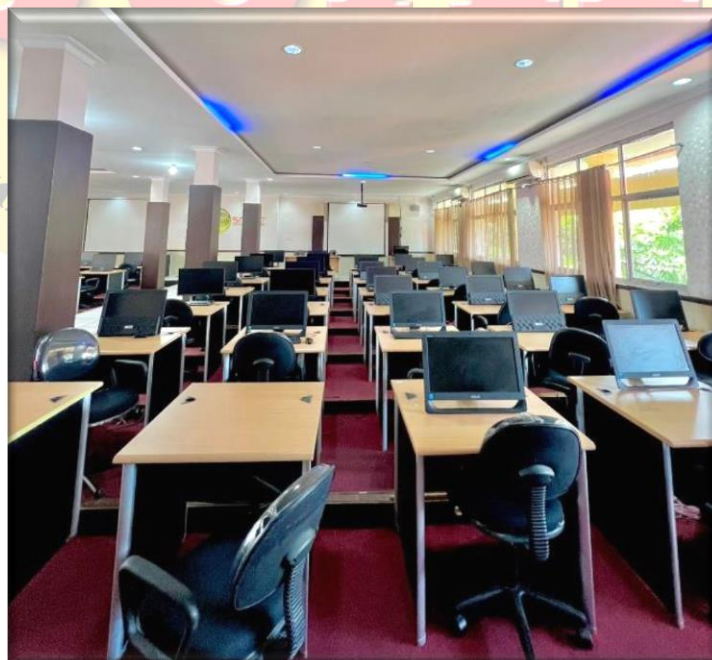


*Ruang Belajar
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*

*Ruang Belajar
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



*Ruang Belajar
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



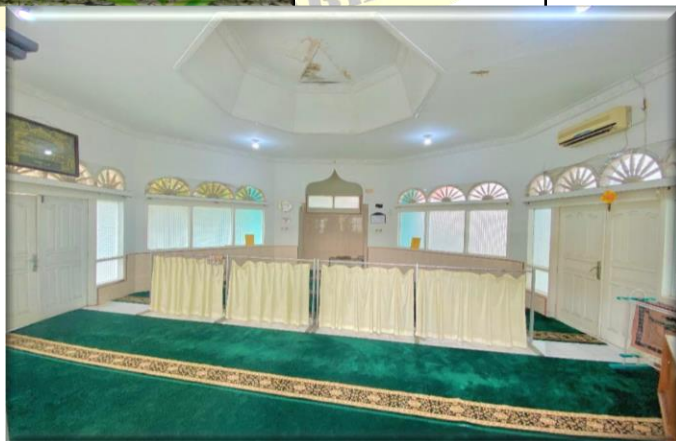
*Lab Komputer
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



*Asrama Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



*Musholla
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*

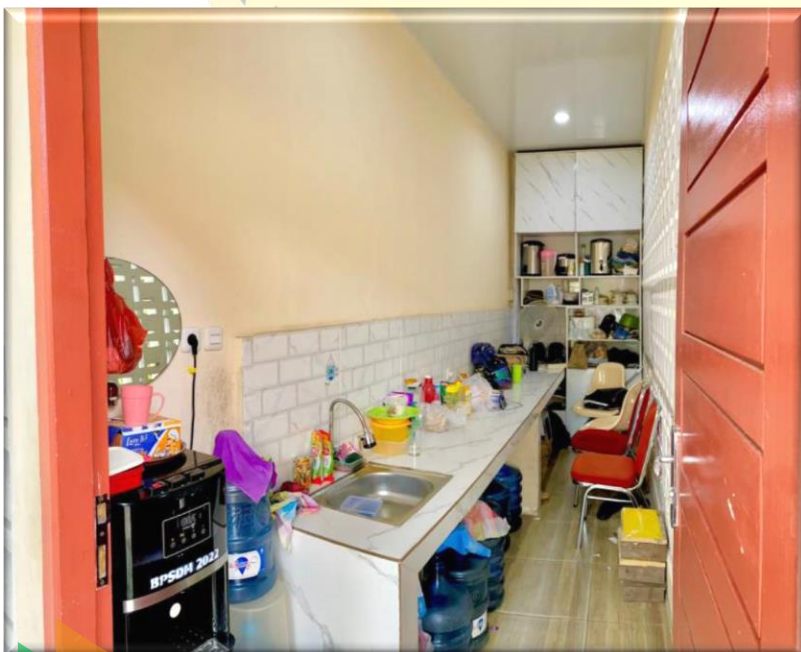




*Fasilitas
Olahraga
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



*Taman Suai
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



*Ruang Pantri
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*

*Pos Security
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



*Lorong Inovasi
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



*Telaga
Bangkom
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Provinsi Riau*



Halaman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau





Ruang Kesehatan dan Laktasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau



Toilet Khusus Pria, Toilet Khusus Wanita dan Toilet Untuk Penyandang Disabilitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau



2.4. Kinerja BPSDM Provinsi Riau

Kinerja BPSDM Provinsi Riau periode sebelumnya merupakan periode awal BPSDM Provinsi Riau sebagai lembaga mandiri yang efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang juga merupakan periode akhir dari pelaksanaan Visi dan Misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Pada periode awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, BPSDM Provinsi Riau dihadapkan pada keterbatasan SDM Aparatur, Kualitas sarana dan prasarana Pelatihan yang masih rendah, serta terbatasnya dukungan Anggaran program/kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM Provinsi Riau. Namun didalam Perjalanan Pelaksanaan Pembangunan Pada Tahun di atas Perlahan Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Sudah mengalami Peningkatan dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Mengingat Adanya Kewajiban Pemenuhan Mandatory Urusan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sebesar 0,34 % dari Total Belanja APBD. Di samping itu juga Kebijakan Kepala Daerah yang menetapkan Bahwa BPSDM Provinsi Riau merupakan satu-satunya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah, capaian kinerja BPSDM Provinsi Riau pada periode yang lalu diantaranya yaitu Adanya Peningkatan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Pemerintah Provinsi Riau dimana Semula Pada tahun 2021 Predikat Penilaian IP ASN Dimensi Kompetensi Pemerintah Provinsi Riau berada pada Kategori Sangat Rendah namun berkat Upaya dan Komitmen bersama Predikat Penilaian telah mengalami Peningkatan dari Tahun sebelumnya sejalan dengan hal tersebut dengan telah terakreditasinya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Pada Tahun 2022 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dengan Kategori Bintang 1 yang Artinya Bahwa BPSDM Provinsi Riau Selaku Lembaga Pendidikan & Pelatihan Pemerintah Daerah sudah dapat melaksanakan Fungsinya sebagai Lembaga Kediklatan secara mandiri.

Tabel 2.4.1
 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Program Pelatihan BPSDM Provinsi
 Riau Tahun 2023 s.d 2024

NO.	Jenis Akreditasi	Nilai Akreditasi	Periode Akreditasi	Instansi Pembina Akreditasi
1.	Akreditasi Kelembagaan BPSDM Provinsi Riau	Bintang 1	2022 s.d 2027	LAN RI
2	Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	B	2022 s.d 2025	LAN RI
3	Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator	B	2024 s.d 2027	LAN RI
4	Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	B	2024 s.d 2027	LAN RI
5	Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	B	2023 s.d 2027	LKPP RI
6	Akreditasi Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan	A	2024 s.d 2029	ANRI

Melihat Data Pada Tabel di atas dapat digambarkan bahwa Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Riau dalam Upaya Menyediakan Layanan Pelatihan pada Program Pelatihan Tertentu dapat dikatakan sudah baik, namun masih diperlukan Upaya maksimal dalam Peningkatan Jumlah Jenis Program Pendidikan Pelatihan yang dapat diselenggarakan Oleh BPSDM sehingga Perwujudan BPSDM sebagai Lembaga Pelatihan Mandiri menuju *Corporate University* dapat diwujudkan.

Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Riau juga dapat dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Utama, yaitu berdasarkan jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja ini dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Riau sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.

Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Merupakan Formulasi Ukuran BPSDM Provinsi Riau dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dimana Indikator tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKN No 08 Tahun 2019 dan Surat Plt Kepala BKN No 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Tentang Pengukuran IP ASN.

Berdasarkan Formulasi Perhitungan di atas, BPSDM Provinsi Riau telah melakukan Serangkaian Proses Perhitungan yang dimulai dari Penghimpunan Data, Rekonsiliasi Data, Perhitungan Data hingga Penetapan Hasil Pengukuran Data. Dari Serangkaian Tahapan di atas Pada Tahun 2024 telah diperoleh Data Hasil Pengukuran IP ASN Dimensi Kompetensi Pemerintah Provinsi Riau sebesar 17,06% Dimana Capaian di atas telah menunjukkan Perkembangan Positif terhadap Pembangunan Sumber Daya Aparatur di Provinsi Riau.

Adapun kinerja BPSDM Provinsi Riau tersebut dapat disajikan sesuai format Tabel T-C.23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20 Jam Pelajaran Per Orang Per Tahun				7,20	7,50	-	-	-	7,24	6,08	-	-	-	100	95	-	-	-
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi				-	-	15	16	17	-	-	15,17	16,09	17,06	-	-	100	100	100
3	Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan				82	84	86	88	90	82	84	86	88	90	100	100	100	100	100

Dari data realisasi capaian Kinerja di atas dapat dilihat, bahwa rasio capaian pelayanan BPSDM Provinsi Riau pada tahun 2020-2024 yang ditunjukkan dari persentase ASN yang lulus mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Riau termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, Namun Periode Pengukuran Indikator Kinerja dimaksud hanya berlangsung pada Periode 2020 s.d 2021 hal ini disebabkan adanya perubahan terhadap Dokumen perencanaan BPSDM yang didasari atas hasil identifikasi Tim Perumusan Dokumen Perencanaan, Selanjutnya Pada Periode 2022 s.d 2024 Indikator Kinerja BPSDM Provinsi telah diubah menjadi Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi.

Seiring dengan penyesuaian kebijakan serta penguatan akuntabilitas pengukuran kinerja, indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosiokultural ASN mengalami perubahan. Indikator yang semula menggunakan Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi dinilai belum sepenuhnya memberikan gambaran operasional yang terukur secara langsung terhadap pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 yang mengamanatkan bahwa setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menegaskan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) per ASN dalam 1 (satu) tahun, maka indikator kinerja tersebut dikembalikan menjadi **“Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP/Orang/Tahun”**.

Selain itu, penyesuaian indikator ini juga selaras dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, serta

Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan dan terencana sebagai bagian dari peningkatan profesionalitas aparatur.

Perubahan indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan, keterukuran, dan keterbandingan capaian kinerja, serta memudahkan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Dengan menggunakan indikator Persentase Pemenuhan 20 JP/Orang/Tahun, organisasi dapat secara lebih objektif menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN secara merata.

Penyesuaian indikator tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya peningkatan kualitas ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi serta tuntutan pelayanan publik.

Adapun Capaian Pelayanan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Riau Tahun 2020 s/d Tahun 2024 secara lebih rinci yang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.2

**Capaian Pelayanan Pelatihan BPSDM Provinsi Riau
Berdasarkan Formulasi IKU**

No.	Program/Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia															
1.1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial	70	70	100	459	447	97,39	260	260	100	320	320	100	5400	5400	100
1.2.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum & Fungsional	416	416	100	342	415	121,35	420	2.645	630	780	1.400	179	614	614	100

No.	Program/Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.	Pengembangan Kompetensi & Profesi Widyaiswara	25	25	100	-	-	-	59	59	100	48	48	100	24	24	100
1.4.	Pengembangan Kompetensi Teknis Inti & Sosiokultural	40	40	100	160	160	100	240	240	100	300	300	100	9682	9682	100
	Jumlah	551	551	100	801	862	107,62	979	3204	307,3	1448	2068	158,32	15720	15720	100

Melihat Capaian Kinerja BPSDM berdasarkan dari Data Di atas dapat digambarkan bahwa Kinerja Urusan BPSDM Provinsi Riau Sudah menunjukkan Trend Kenaikan Positif Pada Tiap Tahunnya, Hal ini tentunya didasarkan pada Komitmen BPSDM Provinsi sebagai Lembaga Pelatihan Aparatur didaerah dalam Menyediakan Layanan Kediklatan bagi Aparatur Provinsi Riau.

Sejalan dengan itu, dengan Memperhatikan kinerja penyelenggaraan Urusan pemerintah daerah mengacu pada RPJMD Provinsi Riau, khususnya pada Urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020-2024 sesuai dengan tujuan BPSDM Provinsi Riau dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.3
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2020 s.d 2024

No.	Tujuan/Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya ASN Yang Memiliki Kompetensi					
	- Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Belum menjadi Indikator Kinerja OPD	Belum Menjadi Indikator Kinerja OPD	15,17	16,09	17,06
	- Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per orang pertahun	7,24 %	6,08 %	13,55 %	38,77 %	39,23 %

No.	Tujuan/Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	• Indeks Kepuasan Pelayanan Pelatihan	82	84	86	88	90
	• Persentase kelulusan peserta pelatihan	100 %	107,62%	100%	100%	100%

Deskripsi Singkat dari data tabel di atas yaitu secara umum Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Riau yang terbagi dari Beberapa indikator dapat dikatakan tercapai 100% dari target tiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Kesesuaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pada Setiap Unit kerja sudah berjalan dengan Baik.

Selain itu dalam kerangka pelaksanaan tugasnya dan fungsinya juga dapat dilihat capaian pelaksanaan pelayanan pelatihan yang dilaksanakan BPSDM Provinsi Riau dari tahun 2020 s.d 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.4.4
Capaian Pelayanan Pelatihan PNS
Yang Dilaksanakan di BPSDM Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024

No.	Nama Kegiatan Pelatihan	2020	2021	2022	2023	2024	KET
1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Prajabatan	70	447	120	200	80	Offline
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum & Fungsional	416	415	518	780	614	Offline
3	Pengembangan Kompetensi Teknis Inti & Sosiokultural	40	-	2.218	7.991	8.174	Online
Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan		551	862	2.882	8.971	8.868	
Jumlah Seluruh PNS		15.085	14.796	14.479	14.725	13.254	
% PNS yang telah mengikuti pelatihan		3,65	6,08	19,90	60,92	66,91	

Merujuk dari Data Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Partisipasi PNS Pemerintah Provinsi Riau dalam Mengikuti Pengembangan Kompetensi telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini dibuktikan dari hasil pengukuran

Indeks Profesional ASN Dimensi Kompetensi dimana Nilai IP ASN Provinsi Riau sudah mengalami Kenaikan dari Tahun Sebelumnya. Namun Jika dilihat dari jumlah dan jenis kegiatan pelatihan dan peserta/alumni yang dihasilkan oleh BPSDM Provinsi Riau masih sangat jauh dari yang telah diamanatkan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, menyatakan **bahwa Setiap Aparatur Sipil Negara Wajib melakukan pengembangan kompetensi Melalui pembelajaran Secara terus Menerus Agar Tetap Relevan dengan Tuntutan Organisasi** dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pembelajaran dalam 1 (satu) tahun. Terdapat Peningkatan Positif terhadap Keikutsertaan PNS Pemerintah Provinsi Riau didalam Mengikuti Pengembangan Kompetensi. Dari hasil Pemetaan Indikator Kinerja Pembangunan SDM Aparatur Tahun 2020 s.d 2024 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.12. berikut :

Tabel 2.4.5
Data Pemenuhan Hak Dan Kesempatan PNS
Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah PNS *)	6.590	14.796	14.479	14.725	13.254
2.	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1.612	1.273	2.882	8.971	8.868
3.	Jumlah PNS yang telah terpenuhi hak dan kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi	477	900	2.882	5.841	5.421
4.	% PNS yang telah terpenuhi hak dan kesempatan 20 JP dalam mengikuti pengembangan kompetensi	7.24	6,08	19,90	39,67	37,86
5.	Jumlah PNS yang belum terpenuhi hak dan kesempatan	6.111	13.896	11.597	8.884	7.833

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
	20 JP dalam Mengikuti pengembangan kompetensi					
6.	Jumlah PNS yang tidak mengikuti Pengembangan Kompetensi	4.978	13.523	11.597	5.754	4.386

Sumber Data : Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Riau 2024

Dari Gambaran data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Riau yang mengikuti Pengembangan Kompetensi telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik hal ini dibuktikan dari Tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja BPSDM Tahun 2024.

Periode tahun 2020 sampai 2024 BPSDM Provinsi Riau juga telah melakukan kerjasama/fasilitasi pelaksanaan pendidikan pelatihan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau serta instansi lain yaitu :

Tabel 2.4.6
Alumni Diklat BPSDM Provinsi Riau

No	Nama Diklat	Jumlah Alumni (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Dasar	2.986	3.136	3.256	3.336	8.816
2.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum & Fungsional	3.235	3.650	4.168	4.948	5.562
3.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sosiokultural	-	-	-	10.177	9.682

Sumber Data : Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Riau 2024

Dari uraian penyajian capaian pelayanan BPSDM Provinsi Riau pada tahun-tahun berikutnya harus dapat menjadi data rincian capaian kinerja pelayanan yang lebih terencana.

Ukuran capaian kinerja pelayanan yang perlu juga menjadi ukuran keberhasilan BPSDM Provinsi Riau yang menjadi ukuran/indikator tercapainya tujuan perangkat daerah kedepan mengacu pada indikator kinerja sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

- a. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pelatihan struktural, dengan formula jumlah pejabat struktural yang telah lulus pelatihan struktural dibagi dengan jumlah seluruh pejabat struktural dikali 100%.
- b. Persentase PNS yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, dengan formula jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dibagi jumlah seluruh PNS pada perangkat daerah yang menyampaikan dan melengkapi data dikali 100%.
- c. Persentase PNS yang telah terpenuhi hak dan kesempatan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi; dengan formula jumlah PNS yang telah terpenuhi hak dan kesempatan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dibagi jumlah seluruh PNS pada perangkat daerah yang menyampaikan dan melengkapi data dikali 100%.
- d. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi: dengan Formula; dengan formulasi Form Pengukuran IP ASN Dimensi Kompetensi pada lampiran III Peraturan Kepala BKN No 8 Tahun 2019;

Adapun capaian kinerja terhadap indikator kinerja tujuan di atas pada tahun 2020 – 2024 adalah :

Tabel 2.4.7

Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan Perangkat Daerah

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan	7.24 %	6,08 %	-	-	-

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	kompetensi minimal 20 jam pelajaran per orang pertahun	7,24 %	6,08 %	-	-	-
2.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	-	-	15,17	16,09	17,06

Capaian kinerja indikator tujuan di atas dapat menjadi acuan BPSDM Provinsi Riau sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, pada tahun 2020-2021 BPSDM Provinsi Riau menetapkan tujuan yaitu Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi dengan Indikator Tujuan yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam per orang pertahun, dan pada tahun 2022-2024 BPSDM Provinsi Riau mengalami perubahan Indikator Tujuan yaitu Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi.

Terhadap kedua indikator tujuan capaian kinerja di atas, salah satu formulasi yang terdampak pada perhitungan capaian kinerja indikator tujuan yaitu Keikutsertaan Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Adapun perhitungan capaian untuk Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pelatihan struktural di atas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4.8
Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Riau Yang Telah Lulus Pelatihan Struktural

No	Uraian	Jumlah Jabatan Struktural					Jumlah Pejabat Struktural Yg Telah Lulus Pelatihan Struktural					% Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pejabat Tinggi Madya / Eselon I	1	1	1	1	1	BKD	BKD	BKD	BKD	BKD					
2.	Pejabat Tinggi Pratama / Eselon II	46	48	40	46	46	BKD	BKD	BKD	BKD	BKD					
3.	Pejabat Administrator / Eselon III	299	300	294	278	278	289	290	278	260	270	90	90	88	88	92
4.	Pejabat Pengawas / Eselon IV	831	840	745	384	384	800	835	740	353	374	92	93	94	85	94
	Total	1.177	1.189	1.080	709	709	1.089	1.125	1.018	613	614	91	92	92	86	93

Sumber Data : Capaian Kinerja BPSDM Prov Riau Tahun 2024

Sedangkan secara keseluruhan PNS yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan) pada masing-masing perangkat daerah disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.4.9

ASN Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TOTAL PNS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		PEMENUHAN 20JP/ORANG/TAHUN T.A 2023		JUMLAH PNS YANG BELUM MEMENUHI 20JP/ORANG/TAHUN		JUMLAH PNS YANG TIDAK MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		NILAI AKUMULATIF	NILAI IP ASN PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		ORANG	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD			
1	2	3	4		5		6		7		8	9 = 8/3	10
1	DINAS PENDIDIKAN	7515	6143	81,74	4568	60,79	2947	39,21	1372	18,26	180000	23,95	
2	DINAS KESEHATAN	291	55	18,90	5	1,72	286	98,28	236	81,10	950	3,26	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	509	58	11,39	19	3,73	490	96,27	451	88,61	1239	2,43	
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	180	121	67,22	11	6,11	169	93,89	59	32,78	2257,5	12,54	
5	DINAS SOSIAL	149	73	48,99	47	31,54	102	68,46	76	51,01	1855,25	12,45	
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	139	131	94,24	66	47,48	73	52,52	8	5,76	2986	21,48	
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN BIDANG KB	101	92	91,09	45	44,55	56	55,45	9	8,91	2383	23,60	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	636	139	21,86	79	12,42	557	87,58	497	78,14	3857	6,07	
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	93	55	59,14	38	40,86	55	59,14	38	40,86	1342	14,43	
10	DINAS PERHUBUNGAN	126	66	52,38	21	16,67	105	83,33	60	47,62	1507,5	11,96	
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	100	57	57,00	39	39,00	61	61,00	43	43,00	1188	11,88	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TOTAL PNS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		PEMENUHAN 20JP/ORANG/TAHUN T.A 2023		JUMLAH PNS YANG BELUM MEMENUHI 20JP/ORANG/TAHUN		JUMLAH PNS YANG TIDAK MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		NILAI AKUMULATIF	NILAI IP ASN PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		ORANG	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD			
1	2	3	4		5		6		7		8	9 = 8/3	10
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	103	56	54,37	56	54,37	47	45,63	47	45,63	1078	10,47	
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	85	7	8,24	2	2,35	83	97,65	78	91,76	222,88	2,62	
14	DINAS KEBUDAYAAN	76	29	38,16	3	3,95	73	96,05	47	61,84	487,5	6,41	
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	81	63	77,78	31	38,27	50	61,73	18	22,22	1531,63	18,91	
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	139	88	63,31	54	38,85	85	61,15	51	36,69	2316,83	16,67	
17	DINAS PARIWISATA	102	1	0,98	1	0,98	101	99,02	101	99,02	150	1,47	
18	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	289	43	14,88	23	7,96	266	92,04	246	85,12	1072	3,71	
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	31	24	77,42	15	48,39	16	51,61	7	22,58	370,75	11,96	
20	DINAS PERKEBUNAN	107	0	0,00	0	0,00	107	100,00	107	100,00	345	3	
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	157	21	13,38	7	4,46	150	95,54	136	86,62	999,75	6,37	
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	210	96	45,71	39	18,57	171	81,43	114	54,29	1400,25	6,67	
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	210	150	71,43	61	29,05	149	70,95	60	28,57	1809	8,61	
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	460	95	20,65	25	5,43	435	94,57	365	79,35	1923,0	4,18	
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	134	132	98,51	66	49,25	68	50,75	2	1,49	2876	21,46	
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	103	46	44,66	15	14,56	88	85,44	57	55,34	690	6,69	
27	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	106	106	100,00	96	90,57	10	9,43	0	0,00	3440	32,45	
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	60	45	75,00	0	0,00	60	100,00	15	25,00	575	9,58	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TOTAL PNS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		PEMENUHAN 20JP/ORANG/TAHUN T.A 2023		JUMLAH PNS YANG BELUM MEMENUHI 20JP/ORANG/TAHUN		JUMLAH PNS YANG TIDAK MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		NILAI AKUMULATIF	NILAI IP ASN PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		ORANG	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD	ORANG	% TERHADAP TOTAL PNS PADA PD			
1	2	3	4		5		6		7		8	9 = 8/3	10
29	BADAN PENGHUBUNG	62		0,00		0,00	62	100,00	62	100,00		0,00	
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	64	17	26,56	7	10,94	57	89,06	47	73,44	352	5,50	
31	BIRO UMUM	83	12	14,46	0	0,00	83	100,00	71	85,54	190	2,29	
32	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	58	21	36,21	2	3,45	56	96,55	37	63,79	333,5	5,75	
33	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	55	2	3,64	2	3,64	53	96,36	53	96,36	430	7,82	
34	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	26	26	100,00	10	38,46	16	61,54	0	0,00	461	17,72	
35	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	35	5	14,29	1	2,86	34	97,14	30	85,71	87,5	2,50	
36	BIRO HUKUM	41	4	9,76	0	0,00	41	100,00	37	90,24	85	2,07	
37	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	49	49	100,00	17	34,69	32	65,31	0	0,00	862,5	17,60	
38	BIRO PEREKONOMIAN	39	36	92,31	13	33,33	26	66,67	3	7,69	779,00	20	
39	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	40	3	7,50	2	5,00	38	95,00	37	92,50	67	1,68	
40	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	195	33	16,92	17	8,72	178	91,28	162	83,08	535	2,74	
41	INSPEKTORAT	136	127	93,38	81	59,56	55	40,44	9	6,62	2122	15,60	
42	RSUD ARIFIN ACHMAD	1030	552	53,59	229	22,23	801	77,77	478	46,41	8754	8,50	
43	RSUD PETALA BUMI	252	79	31,35	22	8,73	230	91,27	173	68,65	949	3,77	
44	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	268	13	4,85	6	2,24	262	97,76	255	95,15	23	0,08	
TOTAL		14725	8971	60,92	5841	39,67	8884	60,33	5754	39,08	236881	16,09	

Dari data di atas dapat dilihat masih kecilnya jumlah dan persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (Pendidikan dan Pelatihan) dibandingkan jumlah seluruh ASN di Provinsi Riau serta terhadap kebutuhan pemenuhan kompetensi dan pengembangan kompetensi ASN Provinsi Riau.

Khusus untuk kegiatan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Riau Tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.10

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS , FUNGSIONAL & SOSIOKULTURAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPSDM PROVINSI RIAU

PELATIHAN TEKNIS

NO	JENIS PELATIHAN	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	-	-	-	-	-	29	-	-			
2	Workshop PKA dan PKP	-	-	-	-	-	-	29				
3	Bimtek Tata Naskah Dinas	-	-	-	-	-	-	50				
4	Bimtek Audit Kinerja Pemerintah Daerah dan Probitiy Audit	-	-	-	-	-	-	55				
5	Diklat Tunas Integritas							40				
6	Bimtek Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	97			41	
7	Pelatihan Manajemen Of Training (MOT) & Training Of Course (TOC)	-	-	-	20	-	-	-	-	23	3	
8	Diklat Teknis Analisis Media Sosial									33		
9	Diklat Perbendaharaan									67	30	
10	Bimtek PIC									16	64	
11	Diklat Tunas Integritas									98		
12	Bimtek Penyusunan Renstra									77		

NO	JENIS PELATIHAN	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabi									50	37	
14	Pelatihan Tunas Inovasi									40		
16	Pelatihan SPBE									36		51
17	Pelatihan Coaching & Mentoring									41	40	40
18	Pelatihan Legal Drafting									30	37	
19	Pelatihan Audit TIK SPBE									41		
20	Lokakarya & Benchmarking									13		
21	Bimtek <i>Learning Management System</i>										40	
22	Pelatihan TOF bagi Tim PUG										28	
23	Pelatihan Teknis Kehumasan Jurnalistik										40	119
24	Pelatihan <i>Government Transformation Academy (GTA)</i>									135	150	121
25	Workshop Pencegahan Stunting (Best Practice)										535	
26	Bimtek Stunting ASN Peduli Kependudukan Tingkat Menengah										20	15
27	TOT Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan									100		
28	Pelatihan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan										40	
29	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah										120	34
30	Pelatihan Hypermedia										50	
31	Workshop Penyusunan Pedoman Stula										64	
32	Bimtek SNI ttg Layanan										50	

NO	JENIS PELATIHAN	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pembelajaran diluar Pendidikan Formal											
33	Workshop Pedoman Penilaian Evaluasi RAP Latsar, PKA & PKP									120	90	
34	TOT Pemerintahan Desa Bagi WI									60		
35	Workshop Penyusunan Pedoman Pelatihan Webinar									44		
36	Workshop Penyusunan Pedoman Pelatihan Webinar									44		
37	Pelatihan Literasi Digital Sektor Pemerintahan									4.388		
38	Training ESQ Bagi Pj.Administrator Pemprov Riau										50	
39	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tipe C											16
40	Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Level I										53	44
41	Pelatihan Teknis General English											60
42	Orientasi Dasar Bagi P3K											5.320
TOTAL		0	0	0	20	0	29	271	291	5.126	1.529	5.820

Sumber Data : Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Riau 2024

PELATIHAN FUNGSIONAL

NO	URAIAN	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Analisis Kepegawaian / SDM Aparatur	5	-	20	12	-	-	-	-		34	
2	Arsiparis	-	-	2	4	-	-	-	-	35		39
3	Auditor	-	-	1	2	-	-	-	-			12
4	Auditor Kepegawaian	5	-	-	-	-	-	-	-			
5	Inspektur Ketenaga Listrik	-	-	-	3	-	-	-	-			

NO	URAIAN	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	50	-	-	60	53	60
7	Training Of Course (TOC)	-	-	-	-	-	30	-	-			
8	Diklat Pengelolaan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	50				43
9	Diklat Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	49				30
10	Pelatihan Substantif Widyaiswara /Penyusunan DUPAK							15		60		
11	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi JFT Guru	-	-	-	30	-	-	-	-	188	120	
12	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian	-	-	-	20	-	-	-	-			
13	Diklat Teknis Kewidyaiswaraan Berjenjang	-	-	-	-	1	-	-	-			
14	Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara	-	-	-	-	6	-	-	-			
15	Diklat Penghitungan Dupak Satpol PP								50			
16	Diklat Audit BUMD								50			
17	Diklat Audit investigatif								50	29		
18	Pelatihan JFT Analisis Kebijakan									52		30
19	Pelatihan Bagi JFT Perencana									31	30	
21	Pelatihan Arsip Dinamis									35		
22	Pelatihan Pranata Komputer									50		
23	Pelatihan Bagi Asesor Pemerintahan									40		
23	Pelatihan Audit Atas Pengelolaan PAD										31	
24	Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana										38	
25	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial										30	

NO	URAIAN	TAHUN											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
26	Pelatihan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan											30	
27	Pelatihan Dasar Bagi JFT DPM-PTSP											40	
28	Pelatihan TOT Orientasi DPRD bagi Widyaiswara											37	
29	Pelatihan Bagi Guru & Kepala Sekolah Terkait Kesejahteraan Psikologi, Agama, Budaya & Kebangsaan											165	40
30	Pelatihan JFT Pustakawan												43
TOTAL		10	0	23	71	7	80	114	150	580	608	297	

Sumber Data : Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Riau 2023

PELATIHAN SOSIOKULTURAL

NO	URAIAN	TAHUN											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Webinar BERAKHLAK Series 1 s.d 8	5	-	20	12	-	-	-	-	10.727	4.915	10.492	
2	Tausiah Online Core Value ASN BERAKHLAK	-	-	2	4	-	-	-	-	7.959	4.273	-	
3	Seminar Pemerintahan	-	-	1	2	-	-	-	-		361	-	
TOTAL		5	0	23	18	0	0	0	0	7.959	9.188	10.492	

Sumber Data : Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Riau

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa kemampuan BPSDM Provinsi Riau dalam menyediakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Pada Periode 2020 s.d 2024 Sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan atas cakupan layanan diklat yang diberikan bagi ASN Pemerintah Provinsi Riau , Namun kedepan perlu penguatan lebih sehingga Kapasitas Kelembagaan BPSDM Provinsi Riau dapat lebih Maksimal.

PELATIHAN TEKNIS MENGGUNAKAN DATA TERPILAH TAHUN 2020-2025

NAMA PELATIHAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DIKLAT TUNAS INTEGRITAS	42					
-- Laki-laki	29					
-- Perempuan	13					
BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA		77				
-- Laki-laki		53				
-- Perempuan		24				
PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH			187	125	46	
-- Laki-laki				30	18	
-- Perempuan				95	28	
BIMTEK PAK WI			53			
-- Laki-laki			34			
-- Perempuan			19			
PELATIHAN ASESOR			46			
-- Laki-laki			30			
-- Perempuan			16			
PELATIHAN TUNAS INOVASI			40			
-- Laki-laki			21			
-- Perempuan			19			
PELATIHAN ANALIS KEBIJAKAN			50			
-- Laki-laki			34			
-- Perempuan			16			
TRAINING ESQ CHANGE LEADER BASED ON BerAKHLAK CULTURE				50		
-- Laki-laki				33		
-- Perempuan				17		
PELATIHAN COACHING MENTORING BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU				47	36	
-- Laki-laki				32	22	
-- Perempuan				15	14	
PELATIHAN PEMANTAPAN NILAI - NILAI KEBANGSAAN BAGI TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU				42	42	
-- Laki-laki				12	11	
-- Perempuan				30	31	
PELATIHAN HOSPITALITY					38	
-- Laki-laki					24	
-- Perempuan					14	
PELATIHAN CALON PENYULUH ANTI KORUPSI (PELOPOR)					46	
-- Laki-laki					32	

NAMA PELATIHAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-- Perempuan					14	
SERTIFIKASI JALUR PENGALAMAN SKEMA PENYULUH ANTIKORUPSI					17	
-- Laki-laki					14	
-- Perempuan					3	
PELATIHAN PEMBANGUNAN BUDAYA ANTIKORUPSI						137
-- Laki-laki						57
-- Perempuan						80
PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA						120
-- Laki-laki						60
-- Perempuan						60
Total	42	77	376	264	225	257
-- Laki-laki	29	53	119	141	121	117
-- Perempuan	13	24	70	173	104	140

Adapun secara garis besar dukungan agar Kapasitas Kelembagaan BPSDM Provinsi Riau dapat lebih kuat diantaranya sebagai berikut :

- a. Perlu adanya Regulasi/Kebijakan Daerah terhadap Kewajiban ASN didalam mengikuti Pengembangan Kompetensi
- b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Penguatan/Pembaharuan Kelembagaan BPSDM Provinsi Riau dalam menyikapi Pemberlakuan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana disebutkan bahwa Kewenangan Pelaksanaan Pelatihan melalui Pola Kontribusi (Tarif Jasa) tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Perlu dilakukan Penyesuaian Kelembagaan BPSDM Selaku Lembaga Diklat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mitra Kerja lainnya.

2.5. Kelompok Sasaran Pelayanan BPSDM Provinsi Riau

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya BPSDM Provinsi Riau berperan terhadap Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara dan Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya. Berikut Data Jumlah ASN di Provinsi Riau Pada Periode 25 April 2025 berdasarkan Rilis Data BKN Kanreg XII Pekanbaru :

No	Instansi	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Total
1	Pemerintah Provinsi Riau	13.254	6.337	19.951
2	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.189	660	6.849
3	Pemerintah Kab Indragiri Hulu	4.641	607	5.248
4	Pemerintah Kab. Pelalawan	4.166	1.092	5.258
5	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	4.371	722	5.093
6	Pemerintah Kab.Kampar	6.487	279	6.766
7	Pemerintah Kab Rokan Hulu	4.977	876	5.853
8	Pemerintah Kab.Rokan Hilir	5.609	2.312	7.921
9	Pemerintah Kota Dumai	3.676	693	4.369
10	Pemerintah Kab. Bengkalis	5.895	2.388	8.283
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.570	862	3.432
12	Pemerintah Kab Siak	5.132	2.200	7.332
13	Pemerintah Kota Pekanbaru	5.911	752	6.663
	TOTAL	72.878	19.780	93.018

Berdasarkan Data Pada Tabel di atas dapat digambarkan bahwa Kewenangan BPSDM Provinsi Riau selaku Instansi Pembina Lembaga Pelatihan Daerah dalam Menyediakan Layanan Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi Riau sangat besar sehingga Perlu mempersiapkan dukungan berupa Kelembagaan dan Sumber Daya kediklatan.

2.6. Mitra Kerja BPSDM dan Kerjasama BPSDM dalam Pengembangan Kompetensi ASN

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPSDM Provinsi Riau dalam menyediakan layanan Pendidikan & Pelatihan bagi ASN di Provinsi Riau tentunya didukung oleh Mitra Kerja

BPSDM terkait Pengembangan Kompetensi ASN, berikut disampaikan Data Capaian Kinerja

BPSDM dalam melaksanakan Kerjasama dan fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN :

Tabel 2.6.1

Jumlah Kerjasama BPSDM dengan Kementerian, Lembaga, Kabupaten, Kota dan Lembaga Pelatihan Tahun 2023 s.d 2024

NO.	K/L Kabupaten /Kota/Lemdik	Jenis Pelatihan yang di Kerjasamakan	Jumlah Peserta	Pola Kerjasama	Tahun
1.	Kab. Siak	Pelatihan Orientasi Bagi P3K	242	Fasilitasi	2023
2	Kab.Bengkalis	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	40	Fasilitasi	2023
			40		2024
		Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	40		2024
		Pelatihan Orientasi Bagi P3K	2800		2024
3	Kab. Kampar	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	40	Fasilitasi	2023
4	Kab. Rokan Hilir	Pelatihan Dasar CPNS	80	Fasilitasi	2023
		Pelatihan Orientasi Bagi P3K	500		2024
5	Kab. Rokan Hulu	Pelatihan Orientasi Bagi P3K	361	Fasilitasi	2024
6	BNPB	Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	38	Fasilitasi	2023
7	KEMENKOMINFO	Pelatihan <i>Government Training Academy</i> (GTA)	150	Fasilitasi	2023
			121		2024
8	BKKBN	Bimbingan Teknis Program Stunting ASN Peduli Kependudukan di Tingkat Provinsi	20	Fasilitasi	2023
			15		2024
9	BADAN STANDARISASI NASIONAL	Bimbingan Teknis Standar Nasional Indonesia (ISO) 29993;2017 IDT Tentang Layanan Pembelajaran Diluar Pendidikan Formal-Persyaratan Layanan	50	Fasilitasi	2023
10	LEMBAGA ESQ	Training ESQ <i>Change Leader Based On BerAKHLAK Culture</i>	50	Fasilitasi	2023
11	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Pelopor)	27	Fasilitasi	2024
		Sertifikasi Jalur Pengalaman Skema Penyuluh Anti Korupsi	7		

Melihat dari data Pada Tabel 2.6.1 di atas dapat digambarkan bahwa Masih belum Optimalnya BPSDM Provinsi Riau Selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

Pembinaan Terkait Urusan Pendidikan & Pelatihan Pemerintah Daerah di dalam menyediakan Layanan Pendidikan Pelatihan bagi Pemerintah Daerah , hal ini tergambar masih terbatasnya Jumlah Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Kerjasama Pendidikan Pelatihan di BPSDM Provinsi Riau, Salah satu Faktor Penyebab terjadinya yaitu Status Kelembagaan BPSDM yang belum mendukung terkait Pola Pembiayaan Jasa Pelatihan Secara Kontribusi mengingat adanya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Jasa Pendidikan dan Pelatihan dimana Keberadaan BPSDM Provinsi Riau diuntungkan dengan Status Kelembagaan yang dimiliki serta dukungan Ketersediaan Sumber daya Kediklatan dan beberapa Program Pelatihan yang telah terakreditasi tentunya keunggulan ini dapat dijadikan Modal awal di dalam Upaya Menyediakan Layanan Pengembangan Kompetensi ASN dan Berkontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2.7. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan adalah proses awal dalam menemukan, memahami, dan merumuskan masalah utama yang sedang atau akan dihadapi. Proses ini menjadi dasar penting dalam penyusunan solusi, pengambilan keputusan, ataupun pelaksanaan kegiatan lanjutan seperti penelitian atau perencanaan program.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai acuan dasar dalam pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara antara lain menyatakan bahwa :

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, menyatakan bahwa Setiap Aparatur Sipil Negara Wajib melakukan pengembangan kompetensi Melalui pembelajaran Secara terus Menerus Agar Tetap Relevan dengan Tuntutan Organisasi;

2. Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara didasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 juga mengamanatkan pembenahan dan peningkatan kinerja melalui penerapan Sistem Merit yaitu kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Konsep sistem merit dibangun berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan memperhatikan keadilan dan kesinambungan. Melalui mekanisme berbasis merit, diharapkan tercipta ASN yang profesional, netral dan berintegritas, yang mampu mendorong birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang berkompeten dalam menangani berbagai permasalahan publik (*public affair*) dan berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*).

Khusus terkait dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur hasil yang diharapkan adalah SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.

Penjelasan di atas juga memberikan gambaran dan arahan bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Urusan pengembangan kompetensi aparatur ini sangat strategis karena merupakan modal utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur dewasa ini semakin penting seiring dengan dinamika

tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, perubahan paradigma pemerintahan (*Good Governance, publik service excellent*), serta globalisasi seperti *integrated economic* (MEA, ACFTA, WTO).

Renstra BPSDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengelaborasi pola dan prinsip pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta memperhatikan Sinergisitas Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Riau yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen PAN dan RB RI), Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Melihat pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur.

Beberapa perubahan kebijakan Aparatur yang dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung memberikan arah baru dalam kebijakan pengelolaan ASN Salah satunya Terkait Pengembangan Kompetensi. Sejalan dengan Penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan/kewenangan telah memberi filosofi peran dan kewenangan yang lebih luas kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai unit organisasi yang melaksanakan fungsi Penunjang urusan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara.

Peran BPSDM secara nasional mencakup Pengembangan Kompetensi, Standarisasi, dan Sertifikasi, selanjutnya untuk tingkat provinsi BPSDM sebagai lembaga mandiri berperan dalam hal Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi dengan ruang lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, lembaga

pendidikan dan pelatihan menjadi bagian organisasi perangkat daerah urusan kepegawaian yang memiliki peran Pengembangan Kompetensi. Disamping itu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah yang terakreditasi BPSDM Provinsi juga mempunyai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan kompetensi serta lembaga pelatihan di daerah.

Ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan melayani menjadi salah satu persyaratan utama sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah. BPSDM sebagai organisasi perangkat daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab menjalankan urusan Penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan ASN Provinsi Riau yang profesional, berintegritas, dan melayani melalui Pengembangan Kompetensi.

Disamping itu, Representasi perempuan dalam jabatan struktural pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender (PUG). Keberadaan perempuan dalam jabatan struktural diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih inklusif dalam perumusan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia aparatatur. Selain itu, representasi perempuan juga menjadi teladan positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, responsif gender, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk persentase jabatan struktural di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau yaitu Laki-Laki berjumlah 3 Orang (37,5%) dan Perempuan berjumlah 5 Orang (62,5%)

Setelah melewati periode pertama jangka menengah pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau masih dihadapi permasalahan untuk meningkatkan kapasitas pelatihan dan Pemenuhan standar

pelayanan kediklatan yang dibuktikan dengan tingkat dan jumlah program pelatihan yang terakreditasi serta jumlah alumni yang dihasilkan BPSDM Provinsi Riau.

Selanjutnya identifikasi permasalahan urusan penunjang pendidikan dan pelatihan di daerah yang terkait dengan BPSDM Provinsi Riau dapat dipetakan sesuai format Tabel T-B.35 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.1 (T-B.35)

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1	Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kompetensi teknis dan fungsional sumber daya manusia aparatur • Rendahnya kompetensi teknis Inti & Sosiokultural sumber daya manusia aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional sumber daya manusia aparatur • Belum terpenuhinya pengembangan kompetensi teknis Inti dan Sosiokultural sumber daya manusia aparatur
2	Rendahnya kualitas pelayanan pelatihan aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya kapasitas dan Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan • Belum terpenuhinya kebutuhan kompetensi sumber daya manusia pelatihan • Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pelatihan • Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pelatihan antar lembaga • Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi • Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan sertifikasi kompetensi • Keterbatasan anggaran dan prioritas rehabilitasi sarpras yang berperspektif gender dan inklusif

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 49 dibunyikan bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Hal ini menggambarkan bahwa pengembangan kompetensi telah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang ASN guna mengembangkan kemampuan *Soft Skill* dan *Hard Skill* dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah PNS yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi yaitu sebanyak 7.030 (49,26%) orang dari total PNS Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 14.271 orang yang tersebar pada 44 perangkat daerah yang telah didata pada tahun 2023 (*Sumber data Total Jumlah ASN dari BKD Provinsi Riau TA. 2023*).

Salah Satu Poin Penting dari Hasil Penilaian Akreditasi LAN RI yaitu Masih Rendahnya kualitas Manajemen pelayanan pelatihan dimana Salah Satu Poin utama dalam Penilaian tersebut adalah Perlunya manajemen Pengelolaan Pelatihan yang baik serta Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelatihan.

2.8. Isu Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Penentuan isu strategis BPSDM Provinsi Riau tak terlepas dari penyajian pembahasan bab sebelumnya. Selain itu penentuan isu strategis juga didasarkan pada identifikasi dan telaahan permasalahan pelayanan, kinerja jangka menengah periode sebelumnya, sasaran jangka menengah kementerian/lembaga terkait, dan perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Riau.

Kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Riau tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia Pelatihan, sarana prasarana dan Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga pelatihan. Upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kediklatan

dan pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standar masih sangat kurang, kesenjangan ini ditambah dengan adanya kebijakan baru dan perubahan regulasi terkait standar/jenis kompetensi maupun karena adanya pengembangan program-program kediklatan yang menuntut ketersediaan sumber daya kediklatan sesuai kebijakan/regulasi terbaru.

Sarana dan prasarana BPSDM Provinsi Riau dalam menunjang pelayanannya masih jauh dari standar yang dibutuhkan, karena yang tersedia saat ini adalah kondisi pada eks UPT Pendidikan dan Pelatihan (unit eselon III). Disamping dengan ketersediaan kelas dan asrama beserta kelengkapannya yang masih belum mampu menampung kebutuhan penyelenggaraan diklat dibanding kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

Sementara itu jika dilihat kinerja BPSDM Provinsi Riau tahun 2023 menunjukkan capaian yang sangat baik, dimana capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan rasio capaian sebesar 100%. Pada tahun 2023 BPSDM Provinsi Riau melaksanakan 57 (Lima Puluh Tujuh) Jenis Pelatihan yang mampu menghasilkan 7.030 ASN Provinsi Riau yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi di BPSDM Provinsi Riau.

Dari telaahan Renstra kementerian dan lembaga terkait, arah kebijakan utama pembangunan SDM Aparatur tergambar dalam strategi percepatan Reformasi Birokrasi. Kelembagaan birokrasi merupakan instrumen pelaksana kebijakan pembangunan yang didukung ASN yang profesional, beretika, dan berintegritas. Kaitan dengan hal tersebut, tugas-tugas urusan konkuren yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya tidak berarti mengabaikan prioritas pembangunan SDM Aparatur di daerah.

Isu strategis pembangunan SDM Aparatur secara nasional antara lain peningkatan profesionalitas ASN juga menjadi isu dan sasaran di daerah termasuk Kabupaten/Kota, seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan oleh pemerintah. Namun pembiayaan daerah tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan SDM Aparatur sehingga program dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM Aparatur belum memadai.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, identifikasi dan perumusan isu strategis yang akan ditangani melalui Rancangan Renstra BPSDM Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis & Sosiokultural ASN .
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.

Tabel 2.8.1
Analisa Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kewenangan pengembangan kompetensi ASN (manajerial, teknis, sosial kultural)	Kompetensi ASN belum merata dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan jabatan	Peningkatan kapasitas SDM untuk pembangunan berkelanjutan	<i>Digital transformation & AI</i>	Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK	Kualitas ASN kab/kota belum merata	Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN berbasis kebutuhan organisasi dan pembangunan daerah
Ketersediaan lembaga pelatihan terakreditasi	Keterbatasan widyaiswara dan tenaga pengajar bersertifikasi	Integrasi pembangunan berwawasan lingkungan dalam diklat	<i>Green governance</i>	Reformasi birokrasi & SAKIP	Tantangan tata kelola pemerintahan daerah	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelatihan ASN yang adaptif dan inovatif
Dukungan regulasi pengembangan SDM ASN	Perencanaan Pengembangan Kompetensi belum terintegrasi dengan manajemen talenta	Penguatan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	<i>Knowledge-based economy</i>	Implementasi Manajemen Talenta Nasional	Kebutuhan ASN profesional mendukung RPJMD Riau	Lemahnya integrasi sistem pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta ASN
Potensi kerja sama dengan instansi pusat dan lembaga pelatihan	Pemanfaatan teknologi pembelajaran (e-learning/blended learning) belum optimal	Efisiensi sumber daya dan pengurangan jejak karbon	<i>Remote learning system</i>	Transformasi digital pemerintahan (SPBE)	Keterbatasan akses pelatihan di daerah terpencil	Belum optimalnya digitalisasi sistem pembelajaran ASN di Provinsi Riau

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan & Sasaran BPSDM Provinsi Riau

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam Periode Waktu Tertentu yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi dengan memperhatikan isu strategis dibidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai secara nyata menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Tabel 3.1.1
Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi Riau

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi		Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Nilai)	19,67	20,54	20,89	21,42	21,87	22,32	
		1. Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP/Orang/Tahun (%)	18	19	20	21	22	23	
		2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan	Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan (Nilai)	90	91	92	93	94	95	
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	77,90	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	

Berdasarkan Gambaran tabel di atas telah dirumuskan **TUJUAN & SASARAN** Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau Periode Tahun 2025 -2029 adalah:

Tujuan :
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi

Sasaran :
I. Meningkatnya Kompetensi ASN
II. Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan
III. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi pada lima tahun kedepan diharapkan dapat mendorong seluruh pihak baik BPSDM Provinsi Riau maupun Perangkat daerah dan segenap pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan fungsi dan perannya dalam mengembangkan kompetensi dan sertifikasi kompetensi aparatur di daerah.

Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator “Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP/Orang/Tahun”. Selanjutnya penjabaran dari tujuan maka dirumuskan sasaran strategis BPSDM Provinsi Riau periode lima tahun kedepan yaitu :

- a. Meningkatnya Kompetensi ASN; merupakan sasaran dengan orientasi keluar (*outward looking*) BPSDM Provinsi Riau yang diberi fungsi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Kualitas sumber daya manusia ini akan dapat dicapai dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang dipengaruhi 3 (tiga) unsur kediklatan yaitu peserta diklat, penyelenggara diklat, dan pengajar.
- b. Meningkatnya kualitas layanan pelatihan; merupakan sasaran dengan orientasi ke dalam (*inward looking*) BPSDM Provinsi Riau yang paling tidak ditentukan oleh 3 (tiga) unsur yaitu sarana dan prasarana, tenaga kediklatan, serta sistem Pembelajaran dan pedoman kediklatan.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; merupakan sasaran dengan orientasi hasil (*outcome oriented*), sasaran ini berfokus pada hasil atau dampak dari penyelenggaraan Pemerintahan, bukan sekedar pada proses atau output kegiatan.

3.2. Strategi BPSDM Provinsi Riau

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan telaahan permasalahan isu-isu strategis dan arsitektur kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Riau diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau khususnya dalam kaitan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju *World Class Government*.

Dalam rangka mendukung pendekatan isu tematik yang salah satunya Responsif Gender dan Inklusif, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau memandang isu kesetaraan dan keadilan gender sebagai salah satu isu strategis yang perlu direspon secara sistematis. Permasalahan gender dalam konteks pengembangan SDM aparatur diantaranya masih terbatasnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi, belum optimalnya pemanfaatan data terpilah gender, serta masih adanya kesenjangan akses dan partisipasi aparatur perempuan dan laki-laki dalam Pengembangan Kompetensi.

Strategi BPSDM Provinsi Riau dalam menjawab permasalahan dan isu strategis gender diarahkan pada penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pengembangan sumber daya manusia aparatur. PUG dilaksanakan sebagai pendekatan yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan BPSDM, sehingga setiap kebijakan dan program pengembangan kompetensi mampu merespons kebutuhan yang berbeda antara aparatur perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional.

Dalam mendukung strategi tersebut, BPSDM Provinsi Riau berupaya memperkuat kelembagaan dan kapasitas internal melalui peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur terkait perspektif gender, termasuk dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran responsif gender. Penguatan kapasitas ini diarahkan agar seluruh unit kerja mampu mengidentifikasi potensi kesenjangan gender serta merumuskan intervensi yang tepat dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029, rumusan strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Riau sebagaimana format Tabel-C.26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi BPSDM Provinsi Riau

VISI : Riau berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju		
MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kompetensi ASN 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Layanan Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN Tersedianya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis ,Umum, Fungsional & Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Serta Pengembangan Kompetensi Teknis Inti & Sosiokultural ASN
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kapasitas Kelembagaan dan Penyelenggaraan pelatihan Serta Tersedianya Layanan Sertifikasi Kompetensi bagi ASN
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja yang terukur dan berbasis hasil

Berdasarkan gambaran tabel di atas telah dirumuskan dari arsitektur kinerja BPSDM Provinsi Riau maka ditetapkan 1 (satu) program strategis BPSDM Provinsi Riau untuk dilaksanakan periode Renstra Tahun 2025-2029 yaitu **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;**

3.3. Pentahapan

Pentahapan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja BPSDM Provinsi Riau pada Periode Tahun 2025 – 2029 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra BPSDM Provinsi Riau

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Penguatan Kelembagaan Kompetensi berbasis <i>Corporate University</i> dan Pelayanan Pelatihan	Peningkatan Partisipasi Keikutsertaan ASN dalam Pengembangan Kompetensi dan Pelayanan Pelatihan	Peningkatan Penerapan TIK dan Pelayanan Pelatihan dalam Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kualitas Penyediaan Layanan Pendidikan & Pelatihan bagi ASN dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Sistem Pengembangan Kompetensi yang Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) dan Pelayanan Pelatihan

3.4. Lokus

Lokus Renstra BPSDM Provinsi Riau Pada Periode 2025-2029 secara Umum dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Namun Selaku Instansi Pembina Lembaga Pelatihan ASN di Tingkat Daerah Lokus Pelaksanaan Renstra BPSDM Provinsi Riau dapat dilaksanakan di 12 Kab/Kota Se Provinsi Riau.

3.5. Kebijakan

Tabel 3.5
Arah dan Kebijakan BPSDM Provinsi Riau

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra RPJMD	Keterangan
1	Peningkatan Profesionalitas ASN & Budaya Kerja ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Manajerial bagi Pejabat Struktural • Pemenuhan kompetensi CPNS sebagai persyaratan pengangkatan menjadi PNS • Pemenuhan Kompetensi PPPK sebagai Persyaratan Memulai Pekerjaan • Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi & Kab/Kota 	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan Kompetensi Teknis, Umum Bagi ASN • Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural Bagi ASN • Pemenuhan & Peningkatan kompetensi bagi Jabatan Fungsional tertentu • Pemenuhan & Peningkatan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Bagi ASN 	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum & Fungsional
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kompetensi & Sertifikasi Kompetensi ASN • Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana Pelatihan untuk Mewujudkan Peningkatan kualitas Layanan pelatihan bagi aparatur • Menjadikan BPSDM sebagai lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi bagi Tenaga Pengajar dan penyelenggara pelatihan • Pemenuhan Layanan Sertifikasi Kompetensi Bagi ASN • Menyusun regulasi pengembangan kompetensi aparatur • Menyusun pedoman kegiatan pelatihan aparatur • Menyusun dokumen rencana kebutuhan dan pengembangan kompetensi aparatur 	Sekretariat & Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra RPJMD	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mengukur kinerja pengembangan kompetensi aparatur • Optimalisasi kerjasama pelatihan dengan Kabupaten/ Kota dan Mitra Kerja BPSDM • Menerapkan layanan pelatihan berbasis teknologi informasi • Meningkatkan layanan administrasi registrasi dan sertifikasi pelatihan ASN 	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

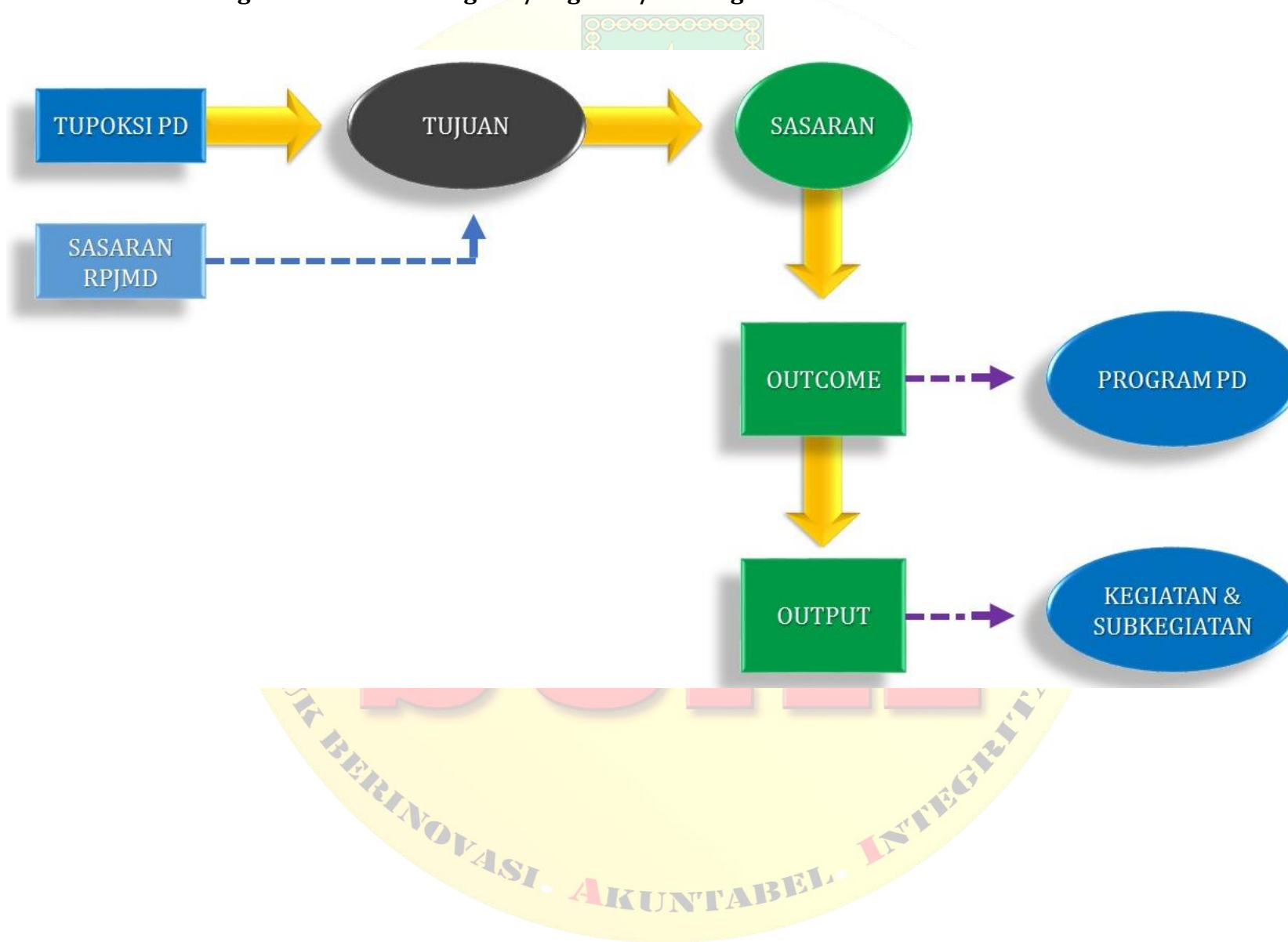
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN HASIL CASCADING DARI TUJUAN DAN SASARAN

Cascading ini merupakan representasi visual yang menunjukkan keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

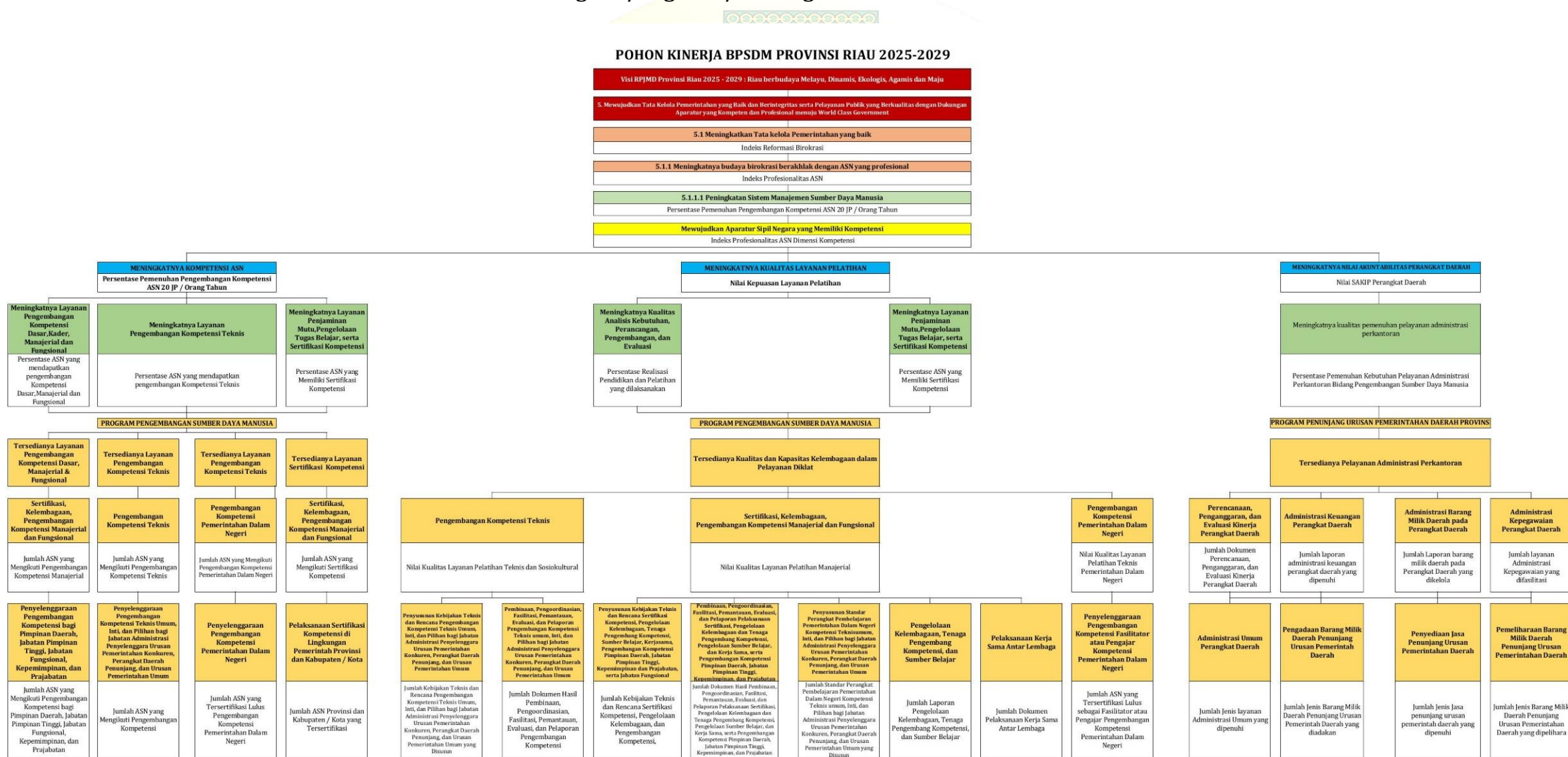
Cascading berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian kinerja yang penting, guna menjamin konsistensi antara perencanaan strategis dengan perencanaan kinerja tahunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh jenjang organisasi mampu memahami kontribusi masing-masing dalam mencapai sasaran strategis secara terintegrasi dan terukur. Struktur pohon kinerja disusun mulai dari tujuan strategis organisasi, yang diturunkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan selanjutnya dikaitkan dengan program, kegiatan, serta sub kegiatan yang mendukung pemcapaian sasaran. Setiap tingkat kinerja memiliki indikator yang relevan dan target yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan.

Berikut ini disajikan gambar perumusan program kegiatan dan sub kegiatan (Cascading) :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPSDM Provinsi Riau



Gambar 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPSDM Provinsi Riau



TABEL 4.1
PROGRAM BPSDM PROVINSI RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					31.704.663.888		33.185.926.278		34.154.046.364		35.145.708.707		36.031.977.045	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					28.881.755.472		29.343.763.722		30.137.484.279		30.949.499.296		31.705.233.052	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	28.881.755.472	100	29.343.763.722	100	30.137.484.279	100	30.949.499.296	100	31.705.233.052	BPSDM Provinsi Riau
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.822.908.416		3.842.162.556		4.016.562.085		4.196.209.411		4.326.743.993	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi, dasar, kader, manajerial, fungsional dan teknis	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	100	100	100	1.882.259.166	100	2.943.134.219	100	3.012.912.835	100	3.095.560.161	100	3.192.134.253	BPSDM Provinsi Riau
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	100	100	100	680.883.606	100	639.262.693	100	713.883.606	100	785.883.606	100	870.883.606	BPSDM Provinsi Riau
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	100	100	100	259.765.644	100	259.765.644	100	289.765.644	100	314.765.644	100	263.726.134	BPSDM Provinsi Riau
TOTAL KESELURUHAN					31.704.663.888		33.185.926.278		34.154.046.364		35.145.708.707		36.031.977.045	

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN FINAL RENSTRA BPSDM
PROVINSI RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
5.04.0.00.0.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA								
Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi	Meningkatnya Kompetensi ASN			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Nilai)			
					Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP/Orang Tahun (%)			
					Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
					Terlaksannnya Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
					Terpenuhinya Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
						Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.02.0006 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	5.04.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	Kepemimpinan, dan Prajabatan	
				Terlaksananya Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03.0001 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03.0002 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)	5.04.02.1.03.0005 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi		Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Terpenuhinya Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01.0002 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terpenuhinya Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	5.04.02.1.02.0002 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	
					Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	5.04.02.1.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	5.04.02.1.02.0004 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	5.04.02.1.02.0005 - Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perancangan, pengembangan dan evaluasi		Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Terpenuhinya Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	5.04.02.1.01.0004 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terpenuhinya Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	5.04.02.1.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	5.04.02.1.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan			Nilai kepuasan layanan Pelatihan (Nilai)		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi, dasar, kader, manajerial, fungsional dan teknis		Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Terlaksannnya Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terpenuhinya Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.02.0006 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	5.04.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
				Terlaksananya Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)	5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03.0001 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	5.04.02.1.03.0002 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)	5.04.02.1.03.0005 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi		Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Terpenuhinya Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01.0002 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terpenuhinya Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	5.04.02.1.02.0002 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	5.04.02.1.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	5.04.02.1.02.0004 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	5.04.02.1.02.0005 - Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perancangan, pengembangan dan evaluasi		Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Terpenuhinya Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.1.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	5.04.02.1.01.0004 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	5.04.02.1.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	5.04.02.1.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.04.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.04.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.04.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.04.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.04.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.04.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.04.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.04.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.04.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.04.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.04.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.04.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN BPSDM PROVINSI RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				31.704.663.888		33.185.926.278		34.154.046.364		35.145.708.707		36.031.977.045		
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				28.881.755.472		29.343.763.722		30.137.484.279		30.949.499.296		31.705.233.052		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	28.881.755.472	100	29.343.763.722	100	30.137.484.279	100	30.949.499.296	100	31.705.233.052	5.04.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53.025.660		55.825.660		56.825.660		57.825.660		58.825.660		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	53.025.660	1	55.825.660	1	56.825.660	1	57.825.660	1	58.825.660		
5.04.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				53.025.660		55.825.660		56.825.660		57.825.660		58.825.660		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	53.025.660	1	55.825.660	1	56.825.660	1	57.825.660	1	58.825.660		
5.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24.520.033.407		22.602.932.909		22.702.932.909		22.802.932.909		22.902.932.909		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	106	126	24.520.033.407	127	22.602.932.909	128	22.702.932.909	129	22.802.932.909	130	22.902.932.909		
5.04.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.520.033.407		22.602.932.909		22.702.932.909		22.802.932.909		22.902.932.909		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	106	126	24.520.033.407	127	22.602.932.909	128	22.702.932.909	129	22.802.932.909	130	22.902.932.909		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.984.668		20.984.668		21.984.668		22.984.668		23.984.668		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	19.984.668	1	20.984.668	1	21.984.668	1	22.984.668	1	23.984.668		
5.04.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				19.984.668		20.984.668		21.984.668		22.984.668		23.984.668		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	19.984.668	1	20.984.668	1	21.984.668	1	22.984.668	1	23.984.668		
5.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84.700.000		85.700.000		86.700.000		87.700.000		88.700.000		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	84.700.000	1	85.700.000	1	86.700.000	1	87.700.000	1	88.700.000		
5.04.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				84.700.000		85.700.000		86.700.000		87.700.000		88.700.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	84.700.000	1	85.700.000	1	86.700.000	1	87.700.000	1	88.700.000		
5.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.331.393.349		2.000.624.516		2.107.624.516		2.214.624.516		2.321.624.516		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	1.331.393.349	10	2.000.624.516	10	2.107.624.516	10	2.214.624.516	10	2.321.624.516		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	2		2		2		2		2			
5.04.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.107.080		80.233.590		81.233.590		82.233.590		83.233.590		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	70.107.080	2	80.233.590	2	81.233.590	2	82.233.590	2	83.233.590		
5.04.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.500.000		60.386.470		62.386.470		64.386.470		66.386.470		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	2	49.500.000	2	60.386.470	2	62.386.470	2	64.386.470	2	66.386.470		
5.04.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				413.029.865		464.959.953		465.959.953		466.959.953		467.959.953		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	413.029.865	10	464.959.953	10	465.959.953	10	466.959.953	10	467.959.953		
5.04.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				72.273.755		70.711.999		72.711.999		74.711.999		76.711.999		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	72.273.755	3	70.711.999	3	72.711.999	3	74.711.999	3	76.711.999		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				107.815.649		147.210.504		148.210.504		149.210.504		150.210.504		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	107.815.649	2	147.210.504	2	148.210.504	2	149.210.504	2	150.210.504		
5.04.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				618.667.000		1.177.122.000		1.277.122.000		1.377.122.000		1.477.122.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	618.667.000	1	1.177.122.000	1	1.277.122.000	1	1.377.122.000	1	1.477.122.000		
5.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				333.960.500		2.288.864.240		2.865.584.797		3.460.599.814		3.999.333.570		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33	10	333.960.500	11	2.288.864.240	12	2.865.584.797	13	3.460.599.814	14	3.999.333.570		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	7	3		3		3		3					
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	1		2		2		1		1			
5.04.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				85.772.500		95.211.613		105.211.613		115.211.613		125.211.613		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	7	3	85.772.500	3	95.211.613	3	105.211.613	3	115.211.613	3	125.211.613		
5.04.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				121.688.000		212.014.172		222.014.172		232.014.172		242.014.172		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33	10	121.688.000	11	212.014.172	12	222.014.172	13	232.014.172	14	242.014.172		
5.04.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		1.715.638.455		2.272.359.012		2.980.374.029		3.499.107.785		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	-	1	1.715.638.455	1	2.272.359.012	1	2.980.374.029	1	3.499.107.785		
5.04.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				126.500.000		266.000.000		266.000.000		133.000.000		133.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	1	126.500.000	2	266.000.000	2	266.000.000	1	133.000.000	1	133.000.000		
5.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.626.908.978		1.324.639.448		1.329.639.448		1.334.639.448		1.339.639.448		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.626.908.978	0	1.324.639.448	0	1.329.639.448	0	1.334.639.448	0	1.339.639.448		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.04.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.275.000		-		-		-		-		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.275.000	0	-	0	-	0	-	0	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				489.403.978		471.269.448		476.269.448		481.269.448		486.269.448		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	489.403.978	2	471.269.448	2	476.269.448	2	481.269.448	2	486.269.448		
5.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.135.230.000		853.370.000		853.370.000		853.370.000		853.370.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	1.135.230.000	2	853.370.000	2	853.370.000	2	853.370.000	2	853.370.000		
5.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				911.748.910		964.192.281		966.192.281		968.192.281		970.192.281		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	911.748.910	6	964.192.281	6	966.192.281	6	968.192.281	6	970.192.281		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30		33		35		37		39			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	392	280		280		280		280		280			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
5.04.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				218.530.000		218.530.000		218.530.000		218.530.000		218.530.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	218.530.000	6	218.530.000	6	218.530.000	6	218.530.000	6	218.530.000		
5.04.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.560.000		37.560.000		37.560.000		37.560.000		37.560.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	37.560.000	1	37.560.000	1	37.560.000	1	37.560.000	1	37.560.000		
5.04.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				57.000.000		58.000.000		60.000.000		62.000.000		64.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30	57.000.000	33	58.000.000	35	60.000.000	37	62.000.000	39	64.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				94.119.750		121.715.000		121.715.000		121.715.000		121.715.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	392	280	94.119.750	280	121.715.000	280	121.715.000	280	121.715.000	280	121.715.000		
5.04.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
5.04.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				184.781.280		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	184.781.280	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
5.04.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				139.757.880		168.387.281		168.387.281		168.387.281		168.387.281		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	139.757.880	1	168.387.281	1	168.387.281	1	168.387.281	1	168.387.281		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.822.908.416		3.842.162.556		4.016.562.085		4.196.209.411		4.326.743.993		
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perancangan,	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti	100	100	259.765.644	100	259.765.644	100	289.765.644	100	314.765.644	100	263.726.134	5.04.0.00.0.00.01.000 - BADAN PENGEMBANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
pengembangan dan evaluasi	Pelatihan (Persentase)													SUMBERDAYA MANUSIA	
5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				821.171.318		1.833.429.856		2.013.429.856		2.157.855.798		2.213.611.764			
Terpenuhinya Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0	1	134.996.300	1	134.996.300	1	144.996.300	1	149.996.300	0	78.956.790			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
5.04.02.1.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				56.039.510		56.039.510		66.039.510		71.039.510		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0	1	56.039.510	1	56.039.510	1	66.039.510	1	71.039.510	0	-		
5.04.02.1.01.0004 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				78.956.790		78.956.790		78.956.790		78.956.790		78.956.790		
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	1	1	78.956.790	1	78.956.790	1	78.956.790	1	78.956.790	1	78.956.790		
5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.401.115.687		1.709.218.060		1.723.838.973		1.738.838.973		1.833.838.973		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	1	1	124.769.344	1	124.769.344	1	144.769.344	1	164.769.344	1	184.769.344		
	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.04.02.1.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				37.196.060		37.196.060		57.196.060		77.196.060		97.196.060		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Dokumen)	0	1	37.196.060	1	37.196.060	1	57.196.060	1	77.196.060	1	97.196.060		
5.04.02.1.02.0008 - Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				87.573.284		87.573.284		87.573.284		87.573.284		87.573.284		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	1	1	87.573.284	1	87.573.284	1	87.573.284	1	87.573.284	1	87.573.284		
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi, dasar, kader, manajerial, fungsional dan teknis	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	100	100	1.882.259.166	100	2.943.134.219	100	3.012.912.835	100	3.095.560.161	100	3.192.134.253		
5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				821.171.318		1.833.429.856		2.013.429.856		2.157.855.798		2.213.611.764		
Terlaksananya Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	11,178	1.025	650.379.900	1.040	1.661.638.438	1.200	1.821.638.438	1.280	1.951.064.380	1.360	2.067.859.856		
5.04.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				650.379.900		1.661.638.438		1.821.638.438		1.951.064.380		2.067.859.856		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	11,178	1.025	650.379.900	1.040	1.661.638.438	1.200	1.821.638.438	1.280	1.951.064.380	1.360	2.067.859.856		
5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.401.115.687		1.709.218.060		1.723.838.973		1.738.838.973		1.833.838.973		
Terpenuhinya Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	5.400	3.080	631.257.855	3.080	981.981.141	160	911.981.141	160	844.981.141	160	844.981.141		
	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	1	1											
5.04.02.1.02.0006 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				-				-		-		-		

AKUNTABEL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				631.257.855		981.981.141		911.981.141		844.981.141		844.981.141			
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	5.400	3.080	631.257.855	3.080	981.981.141	160	911.981.141	160	844.981.141	160	844.981.141			
5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				600.621.411		299.514.640		279.293.256		299.514.640		279.293.256			
Terlaksananya Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	0	1.025	600.621.411	30	299.514.640	60	279.293.256	30	299.514.640	60	279.293.256			
	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)		1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)		30		30				30						
5.04.02.1.03.0001 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				106.076.000		121.753.091		-		121.753.091		-			
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)		30	106.076.000	30	121.753.091		-	30	121.753.091		-			
5.04.02.1.03.0002 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				494.545.411		102.387.226		203.918.933		102.387.226		203.918.933			
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang)	0	1.025	494.545.411	30	102.387.226	60	203.918.933	30	102.387.226	60	203.918.933			
5.04.02.1.03.0005 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				-		75.374.323		75.374.323		75.374.323		75.374.323			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (Laporan)		1	-	1	75.374.323	1	75.374.323	1	75.374.323	1	75.374.323		
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	100	100	680.883.606	100	639.262.693	100	713.883.606	100	785.883.606	100	870.883.606		
5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				821.171.318		1.833.429.856		2.013.429.856		2.157.855.798		2.213.611.764		
Terpenuhinya Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Standar Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0	1	35.795.118	1	36.795.118	1	46.795.118	1	56.795.118	1	66.795.118		
5.04.02.1.01.0002 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				35.795.118		36.795.118		46.795.118		56.795.118		66.795.118		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0	1	35.795.118	1	36.795.118	1	46.795.118	1	56.795.118	1	66.795.118		
5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.401.115.687		1.709.218.060		1.723.838.973		1.738.838.973		1.833.838.973		
Terpenuhi Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tertsertifikasi (Orang)	40	60	645.088.488	60	602.467.575	65	667.088.488	80	729.088.488	120	804.088.488		
	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	0	1		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	2	3		3		3		3		3			
5.04.02.1.02.0002 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				32.620.913		-		42.620.913		52.620.913		52.620.913		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	0	1	32.620.913	0	-	1	42.620.913	1	52.620.913	1	52.620.913		
5.04.02.1.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				145.000.000		145.000.000		155.000.000		195.000.000		260.000.000		
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	40	60	145.000.000	60	145.000.000	65	155.000.000	80	195.000.000	120	260.000.000		
5.04.02.1.02.0004 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				382.293.751		382.293.751		392.293.751		402.293.751		412.293.751		
Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	2	3	382.293.751	3	382.293.751	3	392.293.751	3	402.293.751	3	412.293.751		
5.04.02.1.02.0005 - Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				85.173.824		75.173.824		77.173.824		79.173.824		79.173.824		
Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	1	1	85.173.824	1	75.173.824	1	77.173.824	1	79.173.824	1	79.173.824		
5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				0		0		0		0		0		

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
BPSDM PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA				
1	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi, dasar, kader, manajerial, fungsional dan teknis	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
			5.04.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			5.04.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			5.04.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
			5.04.02.1.03.0002 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA FINAL RENSTRA BPSDM PROVINSI RIAU

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA									
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Nilai	17,06	19,67	20,54	20,89	21,42	21,87	22,32	
3	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP/Orang/Tahun (JKU BPSDM)	%	13,5	18	19	20	21	22	23	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76,75	77,90	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	
5	Nilai kepuasan layanan Pelatihan	Nilai	86	90	91	92	93	94	95	

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI FINAL RENSTRA BPSDM PROVINSI RIAU

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
2	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); serta mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau selaku perangkat daerah harus menyiapkan dokumen perencanaan periodik 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan ASN

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dan kewenangan urusan penunjang pemerintah daerah pada pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, BPSDM wajib menyusun Renstra. Renstra BPSDM Provinsi Riau merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam RPJMD Provinsi Riau telah menetapkan visi yaitu **“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju”**, sedangkan misi yang terkait adalah misi ke 5 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju *World Class Government*”**.

**MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
1	BAB I PENDAHULUAN				
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.	√		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum		√	<p>Untuk menambahkan dasar hukum</p> <p>1.Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam pembangunan Nasional;</p> <p>2. Perda No.3 Tahun 2023 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;</p> <p>3. Inmendagri No.2 Tahun 202</p> <p>4.Peraturan Gubernur Nomor 5 tentang RAD Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029</p> <p>5. terdapat penulisan dasar hukum yang harus disempurnakan. (lembar</p>

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					menjadi lembaran)
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029		√	Menambahkan Maksud Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. Tujuan Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.			Sesuaikan lagi penulisan dan urutan sistematika berdasarkan inmen 2 tahun 2025
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	<p>Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.</p> <p>Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).</p>		√	<p>Menyajikan data SDM terkait ASN Disabilitas yang mengikuti Diklat</p> <p>Menyajikan data sarana prasarana pendukung inklusi dan gender</p>
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah		√		
	Sumber daya Perangkat Daerah		√		
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)			√	
	Kelompok sasaran layanan			√	
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)		√		
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)		√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)		√		
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah			√	
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<p>Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan menampilkan data-data yang lebih spesifik dan mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.</p> <p>Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (<i>bukan menarasikan tabel</i>). Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis “mengapa” suatu kondisi terjadi dan “apa” implikasinya</p>	√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.	√		
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	<p>Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. Kalimat kondisi;</p> <p>b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p>		√	<ol style="list-style-type: none"> Sesuaikan format table dengan yg ada di SIPD. Periksa kembali apakah penulisan tujuan, sasaran, indicator serta target sesuai dgn hasil inputan pada aplikasi SIPD.
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i> . (<i>Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan utama</i>)		√	Tambahkan 1 saran lagi pada table 3.2.1 terkait meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (lihat dan sesuaikan dgn apa yg ada di SIPD tahap final)
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.		√	Belum dilengkapi dengan strategi utk menjawab permasalahan dan isi strategis gender. mohon dilengkapi dengan strategi yang sesuai dengan rekomendasi dalam subbab isu strategis dan permasalahan tsb

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD	√		
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
	Uraian Program	Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.		√	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh table yg akan di sajikan pada bab 4 ini, sesuaikan dengan yg ada didalam system/ di unduh dr SIPD tahap final. Belum terlihatnya taggihan program kegiatan yang mendukung isu gender Tambahkan 1 Sasaran pada casecading (meningkatnya nilai akuntabilitas perangkat daerah) Cascading disajikan berdasarkan hasil inputan dan unduh pd system SIPD tahap final
	Uraian Kegiatan	<p>Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, target dan pagu indikatif</p> <p>Perangkat Daerah memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan. 	√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
		2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. (dengan menggunakan nomenklatur Terlaksananya, Terpenuhinya, Tersedianya, dst..)			
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif		√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuaikan table sub kegiatan prioritas dengan inputan system, table bisa didapatkan dengan cara mengunduh pada SIPD tahap final, perhatikan kembali kesesuaian (target, indicator dan pagunya) 2. dan tambahkan keterangan taggingan ARG/PUG, Kemiskinan dan disabilitas pada kolom keterangan 3. Pagu tahun anggaran 2026 yg disajikan pd dokumen tidak sesuai dengan yg di input pada SIPD tahap final (coba di cek kembali)
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	<p>Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir point 6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)</p> <p>- (Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA, DLL..)</p>		√	Tambahkan Taggingan Program Priroitas PUG, Kemiskinan dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 pada uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
		- Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan Prioritas di SIPD Renstra			pembangunan daerah. Pada (Tabel 4.3 pada kolom keterangan di tandai untuk gender kodenya ARG, untuk disabilitas kodenya disabilitas. Pada table 4.4 prioritas, masukkan program, keg n sub keg yg mendukung disabilitas)
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin 7. Indikator Kinerja Utama (Tabel 4.5) <i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU</i>	√		Pastikan kembali kesesuaian antara tabel yg telah di input di system dengan yang ada di kertas kerja yang telah di sepakati bersama
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin 8. Indikator Kinerja Kunci (Tabel 4.6) <i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Program OPD ke IKK</i>	√		Pastikan kembali kesesuaian antara tabel yg telah di input di system dengan yang ada di kertas kerja yang telah di sepakati bersama
	Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.	(dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - Bagan)	√		Pastikan kembali kesesuaian antara tabel yg telah di input di system dengan yang ada di kertas kerja yang telah di sepakati bersama
5	BAB V PENUTUP				
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah		√	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Lampiran	1.Matrik Verifikasi Renstra 2025-2029 2.SK Tim Penyusun Rernstra 2025 – 2029; 3.Hasil Review Apip; 4.Penyelarasan Renstra Perangkat daerah terhadap RPJMN 2025 – 2029. 5. Metadata			Lengkapi lampiran yang sudah di minta.

Pekanbaru, Oktober 2025

VERIFIKATOR BAPPEDA PROVINSI RIAU :

1. **Raja Juarisman. ST, M.Si**
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. **Ir Ria Ettika. M.Si**
Fungsional Perencana Ahli Madya
3. **Ari Dianuari. ST**
Fungsional Perencana Ahli Muda
4. **Indah Oktaviani. ST**

.....
.....
.....
.....



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Ronggowarsito No. 14 Telp. (0761) 28997 Fax (0761) 28997

e-mail : bpsdm@riau.go.id

PEKANBARU

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU

NOMOR : KPTS. 000.7.6/48/BPSDM/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi jangka menengah daerah Gubernur Riau terpilih periode 2025-2030, selaras dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2025-2029, Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Riau menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a di atas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-undang nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) (Lemba
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengumpulan serta analisis data dan informasi;
 2. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 April 2025

Plt.KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU,



Dr. H. Dianto Mampani, SE., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651018199703 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Riau

Nomor : KPTS . 000 . 7 . 6 / 48 / BPSDM / 2025
Tanggal : 15 April 2025

SUSUNAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala BPSDM Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris BPSDM Provinsi Riau	Ketua
3.	Ketua Tim Perencanaan Program	Sekretaris
4	Dr. Said Syarifuddin, SE, MP, M.Sn	Konsultan Perencanaan Program
5	Suryani, SP., MM	Ketua Tim Supervisi Perencanaan Program
6	Sugiarto, S.ST, M.Si	Anggota Tim Supervisi
7	Hasrul Sani, S.IP, MA	Anggota Tim Supervisi
8	Asnawi, S.Pd.,M.Hum	Anggota Tim Supervisi
9	Raja Siti Nuraisyah, S.Sos., M.Si	Anggota Sekretariat
10	Nurhefni Yuslinda, S. S,i	Anggota Sekretariat
11	Firdaus	Anggota Sekretariat
12	Wiberman, SH	Anggota Sekretariat
13	Eka Guspi Anggriawan, S.Sos, M.Si	Anggota Sekretariat
14	Rahma Yanti, S.Psi	Anggota Sekretariat
15	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Koordinator Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu
16	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
17	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional
18	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 April 2025

Plt.KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU,



Dr. H. Dianto Mampanini, SE., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651018199703 1 00



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh/ Tanggal	Aulia Osna R/	Oktober 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto /	Oktober 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/	Oktober 2025
Uraian Catatan Hasil Reviu			
<p>Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :</p>			
DATA UMUM			
Tujuan : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi.			
Sasaran : 1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosiokultural ASN. 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pelatihan.			
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.			
B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan) Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras namun terdapat indikator "Nilai SAKIP PD" belum disajikan dalam dokumen Rancangan Akhir RENSTRA PD sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.			
Rekomendasi: Disarankan kepada Kepala BPSDM Provinsi Riau agar menyajikan indikator "Nilai SAKIP PD" dalam dokumen Rancangan Akhir RENSTRA PD.			

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras namun satuan dan data capaian DSSD tahun 2024 belum disajikan sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala BPSDM Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data capaian DSSD tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, Oktober 2025

Kepala BPSDM Provinsi Riau



EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19720628 199703 2 004

Supervisor/Pengendali Teknis

RONI COKRO SUBAGIO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196712051998031003

Lampiran KKR - 1
KESELERASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD							HASIL REVU APP		CATATAN/REKOMENDASI	
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELERASAN		
									YA		TIDAK
1					5.04.01.1.01	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	✓	
2					5.04.01.1.02	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/ Bulan	✓	
3					5.04.01.1.03	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk	Dokumen	✓	
4					5.04.01.1.05	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut	Paket	✓	
5					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	✓	
6					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	✓	
7					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	✓	
8					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket	✓	
9					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Paket	✓	
10					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0009	Penyenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	✓	
11					5.04.01.1.07	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	✓	
12					5.04.01.1.07	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	✓	
13					5.04.01.1.07	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	✓	
14					5.04.01.1.07	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	✓	
15					5.04.01.1.08	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	✓	
16					5.04.01.1.08	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	✓	
17					5.04.01.1.08	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	✓	
18					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	✓	
19					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	✓	
20					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	✓	
21					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	✓	
22					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	✓	
23					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	✓	
24					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	✓	
25					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Dokumen	✓	
26					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	Dokumen	✓	
27					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0003	Penyenggaraan Mengikuti	Jumlah ASN yang Mengikuti	Orang	✓	
28					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,	Dokumen	✓	
29					5.04.02.1.02	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Lembaga Sertifikasi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi	Dokumen	✓	
30					5.04.02.1.02	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di	Dokumen	✓	
31					5.04.02.1.02	5.04.02.1.02.0003	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Laporan	✓	
32					5.04.02.1.02	5.04.02.1.02.0004	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran	Dokumen	✓	
33					5.04.02.1.02	5.04.02.1.02.0007	Penyenggaraan Mengikuti	Jumlah ASN yang Mengikuti	Orang	✓	
34					5.04.02.1.02	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,	Dokumen	✓	
35					5.04.02.1.03	5.04.02.1.03.0001	Penyenggaraan Terevaluasi Lulus	Jumlah ASN yang Terevaluasi Lulus	Orang	✓	
36					5.04.02.1.03	5.04.02.1.03.0002	Penyenggaraan Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	Laporan	✓	
37					5.04.01.1.01	5.04.01.1.01.0001	Perencanaan, Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	✓	
38					5.04.01.1.02	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/ Bulan	✓	
39					5.04.01.1.03	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk	Dokumen	✓	
40					5.04.01.1.05	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut	Paket	✓	
41					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	✓	
42					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	✓	
43					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	✓	
44					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket	✓	
45					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Paket	✓	
46					5.04.01.1.06	5.04.01.1.06.0009	Penyenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	✓	
47					5.04.01.1.07	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	✓	
48					5.04.01.1.07	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	✓	
49					5.04.01.1.07	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	✓	
50					5.04.01.1.07	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	✓	
51					5.04.01.1.08	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	✓	
52					5.04.01.1.08	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	✓	
53					5.04.01.1.08	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	✓	
54					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	✓	
55					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	✓	
56					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	✓	
57					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	✓	
58					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	✓	
59					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	✓	
60					5.04.01.1.09	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	✓	
61					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Dokumen	✓	
62					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	Dokumen	✓	
63					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0003	Penyenggaraan Mengikuti	Jumlah ASN yang Mengikuti	Orang	✓	
64					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,	Dokumen	✓	
65					5.04.02.1.01	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Dokumen	✓	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran PD

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVISI/APP		CATATAN/REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		
									YA	TIDAK	
66						5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Mengikuti	Jumlah ASN yang Mengikuti	Orang	√		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran PD
67					5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,	Dokumen	√			
68					5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi	Dokumen	√			
69				5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	√		
70					5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	√			
71					5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga	Jumlah Laporan Pengelolaan	Laporan	√			
72					5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja	Dokumen	√			
73					5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Peringkat Pembelajaran	Jumlah Standar Peringkat	Dokumen	√			
74					5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan	Jumlah ASN yang Mengikuti	Orang	√			
75					5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,	Dokumen	√			
76					5.04.02.1.03.0001 Penyelenggaraan	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus	Orang	√			
77					5.04.02.1.03.0002 Penyelenggaraan	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus	Orang	√			
78					5.04.02.1.03.0005 Koordinasi Penyelenggaraan	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan	Laporan	√			

Lampiran KKR - 2
KESELARASAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM)	HASIL REVIU APIP		CATATAN/ REKOMENDASI
					KESELARASAN		
					YA	TIDAK	
1	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP/Orang Tahun	%	IKU	SASARAN	√		Indikator Kinerja PD telah selaras dengan Bidang Urusan pada PD namun terdapat indikator "Nilai SAKIP PD" belum disajikan dalam dokumen Ranhir Renstra PD PD agar menyajikan indikator "Nilai SAKIP PD" dalam dokumen Ranhir Renstra PD
2	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan	Persentase	IKD	PROGRAM	√		
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Nilai	IKU	TUJUAN	√		
4	Nilai kepuasan layanan Pelatihan	Nilai	IKU	SASARAN	√		
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	IKU	SASARAN	√		

Lampiran KKR - 3

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS PADA RPJMD DENGAN PROGRAM PADA RANHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP		
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
				YA	TIDAK	
1	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	√		Program Prioritas pada RPJMD telah konsisten dengan Program pada Ranhir PD

Lampiran KKR - 4

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RPJMD DENGAN PROGRAM PADA RANHIR RENSTRA PD

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP		CATATAN/ REKOMENDASI
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		KESELARASAN		
				YA	TIDAK	
1	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	√		Program PD pada RPJMD telah konsisten dengan Program pada Ranhir PD
2	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Prioritas)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	√		

KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						HASIL REVIU APIP		CATATAN/ REKOMENDASI	
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					KESELARASAN			
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	YA		TIDAK
1	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 20	%	N/A	N/A	13.5	100%	13.5	18	19	20	21	22	23	√		Penetapan Target IKU telah setaras dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya
2	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Nilai	N/A	17	17.06	100,29%	17.06	19.67	20.54	20.89	21.42	21.87	22.32	√		
3	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN	Nilai kepuasan layanan Pelatihan	Nilai	82	85	86	101.1%	86	90	91	92	93	94	95	√		
4	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	NaN%	76.75	77.90	78.00	78.50	79.00	79.50	80.00	√		

KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						HASIL REVIU APIP				
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					CATATAN YA	CATATAN TIDAK	CATATAN/REKOMENDASI		
									T0	T1	T2	T3	T4				T5	
1	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan	Persentase	95	98	100	102%	100	100	100	100	100	100	100	100	√		Penetapan Target IKD telah selaras dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Lampiran KKR - 7
KESELARASAN PENETAPAN TARGET SUB KEGIATAN DENGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	REKSTRAPD						DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				HASIL REVISI CATATAN REKOMENDASI				
				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD		SATUAN	2022	2023	2024
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						
1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	0	3	1	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024		
2				Pembiayaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi,	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
3				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		1000	1040	1200	1280	1300	1300			2820	930	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
4				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Taleksumum, Inti, dan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
5				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengkajian Kelayakan, Tenaga	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
6				Pembiayaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi,	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
7				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	Dokumen	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
8				Sertifikasi, Kelayakan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	Orang	960	3080	3080	160	160	160	160	160	235	322	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
9					Pengkajian Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
10					Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	160	60	60	66	80	120	120	120	64	40	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
11					Pengkajian Kelayakan, Tenaga Pengembang, Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengkajian Kelayakan, Tenaga Pengembang	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	6	3	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
12					Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
13					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar	Orang	-	30	30	-	-	30	-	-	0	0	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
14					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi	Orang	30	30	30	60	30	60	60	60	0	0	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
15					Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan	Laporan	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Diagalkan PD agar Meryajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024

Form Penyeragaman

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyeragaman Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum 		p	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	01 - Investasi pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">NIHIL</p> </div>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 			1. Dinas Kesehatan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penanggulangan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Lingkungan dan Kehutanan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 			1. Dinas Kelautan dan Perikanan
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program (diisi oleh PD terkait)	Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	<i>Biorefinary</i> Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

NIHIL

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK Mendukung RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan - Kontribusi PDRB sektor perdagangan	- Nilai Ekspor Barang - Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2. Dinas Perkebunan 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Sekretariat Daerah Biro Ekonomi 5. Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Dinas Pariwisata
4 5	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini				1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

NIHIL

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Sosial
6	Indeks Modal Manusia				1. Dinas Pendidikan 2. Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) IKLH Daerah				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
9	Tingkat Pengangguran Terbuka				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA..... DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)**

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
1	Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Merit ASN Minimal “Menengah”	-	54	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Meningkatnya kompetensi				
							Terwujudnya ASN yang profesional, berkualitas, berintegritas, dan mampu melaksanakan tugas secara efektif serta berdaya saing.			

NIHIL

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029)

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem				1. Dinas Sosial 2. dst...
	2) Sekolah Rakyat				1. Dinas Sosial 2. Dst...
B	Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan, pengaliran, dan Pengaliran Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah				
C	Kesehatan Untuk Semua dengan Proyek/Kegiatan				
	1) Jaminan Kesehatan Nasional				1. Dinas Kesehatan 2. dst...
D	Perluasan Akses Pendidikan dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah				1. Dinas Pendidikan 2. dst...
E	Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan				
	1) Pengendalian Inflasi				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM

NIHIL

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. Dinas Pangan 3. Biro Perekonomian 4. Dinas Peternakan 5. Dinas Perikanan dan Kelautan 6. Dst...
	2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM 2. Dst....
	3) Kemudahan perizinan di daerah				1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dst.....
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden				1. Semua OPD

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

Metadata

1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP/Orang/Tahun

Institusi Penghasil : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Defenisi : Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP/Orang/Tahun adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi atau persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, yang telah memenuhi kewajiban minimal 20 Jam Pelajaran (JP) untuk kegiatan pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) tahun.

Interpretasi : Standar minimum Jam Pelajaran (JP) yang wajib dipenuhi oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam satu tahun untuk meningkatkan Pengembangan Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\text{Persentase Pemenuhan} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Memenuhi minimal 20 JP}}{\text{Jumlah Total ASN yang Wajib Memenuhi}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

2. Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan

Institusi Penghasil : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Definisi : Nilai kepuasan layanan pelatihan mengukur seberapa baik pelatihan memenuhi harapan peserta dan dapat diukur melalui survei dengan berbagai indikator seperti tingkat kepuasan terhadap materi, metode penyampaian, dan pengajar. Hasil survei ini penting untuk mengevaluasi kualitas layanan dan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa depan.

Interpretasi : Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan membantu penyelenggara dalam mengevaluasi kekuatan ataupun kelemahan pelaksanaan pelatihan. Tingkat kepuasan layanan pelatihan menggambarkan sejauh mana pelaksanaan pelatihan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan peserta.

Metode/Rumus Perhitungan :

Indeks Kepuasan Layanan Pelatihan diperoleh kumulatif dari indeks kepuasan layanan pelatihan gabungan (tenaga pengajar, penyelenggara dan sarana prasarana) dibagi jumlah pelatihan dalam 1 (satu) tahun

$$IKLP = \frac{\Sigma IKLP - G1 + \Sigma IKLP - G2 + \Sigma IKLP - G3 + \Sigma IKLP - Gn}{N}$$

Ukuran/Satuan : Nilai

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Level Estimasi : Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya